

Jalan Siliwangi Nomor 10 Telepon (0266) 433611 - 431018

Faksimil (0266) 433614 - 221017 - 435006

PALABUHANRATU 43364

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

TAHUN 2023

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kami menyadari dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 ini disusun belum optimal. Harapannya dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional. Melalui dokumen ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi mencoba merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan untuk pembangunan yang berazaskan keadilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat

Demikian Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 ini disusun sebagai pedoman rancangan penyususunan program dan kegiatan Tahunan Sekretariat Daerah

Palabuhanratu, Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH,**

****

**ADE SURYAMAN, SH, MM**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196708151996031002

**DAFTAR ISI**

Halaman

Kata Pengantar 1

Daftar Isi 2

Daftar Tabel 3

BAB I PENDAHULUAN 4

* 1. Latar Belakang 4
  2. Landasan Hukum 8
  3. Maksud dan Tujuan 12
  4. Sistematika Penulisan 12

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU 14

* 1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Tahun 2021dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah 14
  2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 37
  3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 44
  4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 49
  5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah 67
  6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 68

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH 70

* 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasonal 70
  2. Tujuan dan Sasaran RENJA Sekretariat Daerah 74
  3. Program dan Kegiatan 83

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 92

BAB V PENUTUP 128

**DAFTAR TABEL**

1. Tabel 2.1. Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021
2. Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022 (s.d. Juni 2022)
3. Tabel 2.3. Hasil Pencapaian RENSTRA Pada RENSTRA Sekretariat Daerah 2016 – 2021
4. Tabel 2.4. Kategori Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021 Pada RENSTRA Sekretariat Daerah 2016 – 2021
5. Tabel 2.5. Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Pada RENSTRA Sekretariat Daerah 2016 – 2021
6. Tabel 2.6. Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya
7. Tabel 2.7 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021
8. Tabel 2.8 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran terhadap Capaian Anggaran
9. Tabel 2.9 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
10. Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi
11. Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022
12. Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi
13. Tabel 3.3. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023
14. Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo r 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Penyusunan Renja Kerja Tahun 2023 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten. Rencana Kerja Tahun 2023 mengacu dan memperhatikan: (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026; (2) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021 dan RKPD Tahun 2022 Triwulan I; (3) Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026; (4) RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2025; (5) RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032; (6) Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023; (7) RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029; (8) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023; serta (9) Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021- 2026, tema pembangunan pada Tahun 2023 adalah “***Pemantapan pelayanan publik dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi daerah***”. Pembangunan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 diarahkan kepada pemantapan inovasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi, dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi daerah. RKPD tahun 2023 merupakan pelaksanaan perencanaan tahun kedua dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026, sedangkan RPJMD periode 2021-2026 merupakan periode lima tahun terakhir dari RPJPD Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya, yang diampu oleh Sekretariat Daerah. Bagi Sekretariat Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2023.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya, yang diampu oleh Sekretariat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Sekretariat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Sekretariat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Sekretariat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja ini berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja sangatlah menentukan untuk terlaksananya kualitas pelayanan publik yang baik. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Mempunyai arti yang strategis dalam mendukung dan melaksanakan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Sekretariat Daerah merupakan dokumen yang secara subtansil penerjemahan dari visi, Misi, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam rencana kerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan sebagai wujud dari kinerja perangkat daerah pada tahun 2022.

Secara umum Renja ini diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu:

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai Sekretariat Daerah dalam satu tahun kedepan;
2. Langkah - langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Proses penyusunan Renja Sekretariat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan Sekretariat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu sesuai Renstra Sekretariat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip penyusunan rancangan Renja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Sekretariat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif;
3. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah adalah rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana.

Selain itu Renja Sekretariat Daerah merupakan salah satu perangkat dasar untuk ketercapaian pelayanan yang diberikan pada masyarakat yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Kinerja (LKj)

* 1. **Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 No 8, Tambahan Lembaran Daerah No 237);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi;
21. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 3).
    1. **Maksud dan Tujuan**

Esensi dari Rencana Kerja ini bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2023 adalah perwujudan dari implementasi sistem perencanaan daerah. Perencanaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Maksud disusunnya dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 ini adalah untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat target kinerja, realisasi dan proyeksi. Tujuan disusunnya dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 antara lain :

* 1. Memberikan arah yang jelas terhadap target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan;
  2. Memberikan panduan dalam rangka membantu Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi dalam mencapai serangkaian target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan;
  3. Menyajikan dokumen sebagai salah satu pedoman dalam merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan
  4. **Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **BAB I** | **PENDAHULUAN** |
|  | * 1. Latar Belakang |
|  | * 1. Landasan Hukum |
|  | * 1. Maksud dan Tujuan |
|  | * 1. Sistematika Penulisan |
| **BAB II** | **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU** |
|  | * 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah |
|  | * 1. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah |
|  | * 1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah |
|  | * 1. Review terhadap Rancangan Awal RKPD   2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Sekretariat Daerah |
| **BAB III** | **TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH** |
|  | * 1. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah |
|  | * 1. Program dan Kegiatan |
| **BAB IV** | **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** |
|  |  |
| **BAB IV** | **PENUTUP** |

**BAB II**

**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH**

**TAHUN LALU**

* 1. **Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah**

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Renja tahun 2021 dan perkiraan pencapaian Renja tahun 2024. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2021 secara umum Sekretariat Daerah telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Tujuan pembangunan Sekretariat Daerah telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Sekretariat Daerah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Sukabumi. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam capaian kinerja strategis Sekretariat Daerah

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi. Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. Selain dari pada itu evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada Publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program Pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akandatang.

Demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan

* + 1. **Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Tahun 2021**

Atas dasar telah ditetapkannya sasaran dan indikator kinerja Sekretariat Daerah, maka capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2021 dapat diukur melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator kinerja. Hal yang perlu dicermati bersama adalah ketercapaian setiap indikator kinerja tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh bagian yang terdapat di lingkup Sekretariat Daerah dengan berbagai program dan kegiatan yang ada. Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 memuat 3 (tiga) program dan 20 (dua puluh) kegiatan dan 96 (Sembilan puluh enam) sub kegiatan. Total alokasi anggaran sebesar Rp. 91.183.479.824,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah

Tahun Anggaran 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program / Kegiatan / Sub Kegiatan** | **Pagu Anggaran** | **Realisasi** | **%** |
| **I** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **53.017.470.324,00** | **52.540.276.171,00** | **99,10** |
| **1** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **215.418.000,00** | **206.622.300,00** | **95,92** |
| 1,1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 75.915.000,00 | 72.628.750,00 | 95,67 |
| 1,2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.269.000,00 | 5.269.000,00 | 100,00 |
| 1,3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.269.000,00 | 5.269.000,00 | 100,00 |
| 1,4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 7.086.000,00 | 7.086.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **No** | **Program / Kegiatan / Sub Kegiatan** | **Pagu Anggaran** | **Realisasi** | **%** |
| 1,5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 7.086.000,00 | 7.086.000,00 | 100,00 |
| 1,6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 31.028.000,00 | 30.410.800,00 | 98,01 |
| 1,7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 83.765.000,00 | 78.872.750,00 | 94,16 |
| **2** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **27.748.603.421,00** | **27.686.569.624,00** | **99,78** |
| 2,1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 26.589.657.421,00 | 26.538.693.329,00 | 99,81 |
| 2,2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1.058.269.000,00 | 1.051.268.395,00 | 99,34 |
| 2,3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 46.566.000,00 | 46.200.450,00 | 99,21 |
| 2,4 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 8.797.000,00 | 8.499.000,00 | 96,61 |
| 2,5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10.179.000,00 | 10.152.400,00 | 99,74 |
| 2,6 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 12.643.000,00 | 10.643.850,00 | 84,19 |
| 2,7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 19.027.000,00 | 17.647.200,00 | 92,75 |
| 2,8 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 3.465.000,00 | 3.465.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **1.154.170.000,00** | **1.142.983.000,00** | **99,03** |
| 3,1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,2 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1.143.060.000,00 | 1.131.900.000,00 | 99,02 |
| 3,3 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,4 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,5 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 11.110.000,00 | 11.083.000,00 | 99,76 |
| **4** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **377.694.000,00** | **369.349.700,00** | **97,79** |
| 4,1 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4,2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 158.400.000,00 | 157.806.000,00 | 99,63 |
| 4,3 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 86.250.000,00 | 86.051.700,00 | 99,77 |
| 4,4 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 92.394.000,00 | 90.442.000,00 | 97,89 |
| 4,5 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 40.650.000,00 | 35.050.000,00 | 86,22 |
| **5** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **6.898.580.100,00** | **6.891.866.519,00** | **99,90** |
| 5,1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 222.958.500,00 | 222.332.000,00 | 99,72 |
| 5,2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 827.157.850,00 | 825.222.400,00 | 99,77 |
| 5,3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 298.944.500,00 | 298.511.850,00 | 99,86 |
| 5,4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 3.201.850.000,00 | 3.201.538.582,00 | 99,99 |
| 5,5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 871.545.250,00 | 870.447.750,00 | 99,87 |
| 5,6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 76.000.000,00 | 75.600.000,00 | 99,47 |
| 5,7 | Penyediaan Bahan/Material | 184.650.000,00 | 184.650.000,00 | 100,00 |
| 5,8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 722.500.000,00 | 722.494.710,00 | 100,00 |
| 5,9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 440.094.000,00 | 439.492.227,00 | 99,86 |
| 5,10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 52.880.000,00 | 51.577.000,00 | 97,54 |
| **6** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **784.852.400,00** | **775.372.000,00** | **98,79** |
| 6,1 | Pengadaan Mebel | 169.162.000,00 | 168.652.000,00 | 99,70 |
| 6,2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 615.690.400,00 | 606.720.000,00 | 98,54 |
| **7** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **5.591.400.200,00** | **5.379.248.663,00** | **96,21** |
| 7,1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **No** | **Program / Kegiatan / Sub Kegiatan** | **Pagu Anggaran** | **Realisasi** | **%** |
| 7,2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.377.315.000,00 | 1.297.901.563,00 | 94,23 |
| 7,3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4.175.085.200,00 | 4.042.347.100,00 | 96,82 |
| **8** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **6.786.152.000,00** | **6.765.194.055,00** | **99,69** |
| 8,1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2.094.540.000,00 | 2.093.026.124,00 | 99,93 |
| 8,2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2.891.090.000,00 | 2.877.689.931,00 | 99,54 |
| 8,3 | Pemeliharaan Mebel | 86.500.000,00 | 86.500.000,00 | 100,00 |
| 8,4 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 157.100.000,00 | 157.100.000,00 | 100,00 |
| 8,5 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 404.950.000,00 | 404.070.000,00 | 99,78 |
| 8,6 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 944.600.000,00 | 943.831.900,00 | 99,92 |
| 8,7 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 207.372.000,00 | 202.976.100,00 | 97,88 |
| **9** | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **1.460.501.203,00** | **1.415.263.310,00** | **96,90** |
| 9,1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 166.355.528,00 | 166.060.696,00 | 99,82 |
| 9,2 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 102.407.800,00 | 101.882.000,00 | 99,49 |
| 9,3 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 250.000.000,00 | 207.540.614,00 | 83,02 |
| 9,4 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 941.737.875,00 | 939.780.000,00 | 99,79 |
| **10** | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **660.000.000,00** | **652.907.200,00** | **98,93** |
| 10,1 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 318.000.000,00 | 318.000.000,00 | 100,00 |
| 10,2 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 306.000.000,00 | 298.950.000,00 | 97,70 |
| 10,3 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 36.000.000,00 | 35.957.200,00 | 99,88 |
| **11** | **Penataan Organisasi** | **789.348.000,00** | **705.018.800,00** | **89,32** |
| 11,1 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 328.348.000,00 | 287.603.000,00 | 87,59 |
| 11,2 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 375.000.000,00 | 339.921.400,00 | 90,65 |
| 11,3 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 44.172.000,00 | 40.649.900,00 | 92,03 |
| 11,4 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 25.000.000,00 | 20.016.500,00 | 80,07 |
| 11,5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 16.828.000,00 | 16.828.000,00 | 100,00 |
| **12** | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **550.751.000,00** | **549.881.000,00** | **99,84** |
| 12,1 | Fasilitasi Keprotokolan | 226.595.000,00 | 226.595.000,00 | 100,00 |
| 12,2 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 138.720.000,00 | 138.540.000,00 | 99,87 |
| 12,3 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 185.436.000,00 | 184.746.000,00 | 99,63 |
| **II** | **Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat** | **34.934.451.500,00** | **34.900.707.950,00** | **99,90** |
| **1** | **Administrasi Tata Pemerintahan** | **1.059.457.000,00** | **1.033.898.224,00** | **97,59** |
| 1,1 | Penataan Administrasi Pemerintahan | 354.132.000,00 | 349.740.819,00 | 98,76 |
| 1,2 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 268.335.000,00 | 257.052.500,00 | 95,80 |
| 1,3 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 436.990.000,00 | 427.104.905,00 | 97,74 |
| **2** | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **32.979.144.500,00** | **32.979.144.000,00** | **100,00** |
| 2,1 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 32.474.110.500,00 | 32.474.110.000,00 | 100,00 |
| 2,2 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | 256.234.000,00 | 256.234.000,00 | 100,00 |
| 2,3 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | 248.800.000,00 | 248.800.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **No** | **Program / Kegiatan / Sub Kegiatan** | **Pagu Anggaran** | **Realisasi** | **%** |
| **3** | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | **670.168.000,00** | **668.288.000,00** | **99,72** |
| 3,1 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 114.120.000,00 | 114.120.000,00 | 100,00 |
| 3,2 | Fasilitasi Bantuan Hukum | 349.940.000,00 | 349.810.000,00 | 99,96 |
| 3,3 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 206.108.000,00 | 204.358.000,00 | 99,15 |
| **4** | **Fasilitasi Kerjasama Daerah** | **225.682.000,00** | **219.377.726,00** | **97,21** |
| 4,1 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 101.739.000,00 | 95.713.900,00 | 94,08 |
| 4,2 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | 51.855.000,00 | 51.683.201,00 | 99,67 |
| 4,3 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 72.088.000,00 | 71.980.625,00 | 99,85 |
| **III** | **Program Perekonomian Dan Pembangunan** | **3.231.558.000,00** | **2.992.592.010,00** | **92,61** |
| **1** | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | **1.703.159.000,00** | **1.572.007.821,00** | **92,30** |
| 1,1 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 1.042.061.000,00 | 1.021.432.843,00 | 98,02 |
| 1,2 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 470.658.000,00 | 375.709.778,00 | 79,83 |
| 1,3 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | 68.288.000,00 | 58.583.200,00 | 85,79 |
| 1,4 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,5 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | 122.152.000,00 | 116.282.000,00 | 95,19 |
| **2** | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | **284.330.000,00** | **283.738.500,00** | **99,79** |
| 2,1 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | 92.843.000,00 | 92.727.000,00 | 99,88 |
| 2,2 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 101.570.000,00 | 101.139.100,00 | 99,58 |
| 2,3 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 89.917.000,00 | 89.872.400,00 | 99,95 |
| **3** | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | **532.948.000,00** | **532.374.689,00** | **99,89** |
| 3,1 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 156.108.000,00 | 155.548.000,00 | 99,64 |
| 3,2 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | 185.000.000,00 | 184.988.300,00 | 99,99 |
| 3,3 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 191.840.000,00 | 191.838.389,00 | 100,00 |
| **4** | **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** | **711.121.000,00** | **604.471.000,00** | **85,00** |
| 4,1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 510.489.000,00 | 405.321.700,00 | 79,40 |
| 4,2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 65.835.000,00 | 65.514.600,00 | 99,51 |
| 4,3 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 134.797.000,00 | 133.634.700,00 | 99,14 |
| **JUMLAH** | | **91.183.479.824,00** | **90.433.576.131,00** | **99,18** |

Realisasi serapan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2021 sebesar Rp 90.433.576.131,00 atau sebesar 99,18%.

Tabel 2.2

Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah

Tahun Anggaran 2022 (s.d. Juni 2022)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode Rekening** | **Uraian** | **Anggaran** | **Realisasi** | **%** |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | **86.495.924.131** | **50.634.622.467** | **58,54** |
| **05.01** | **BELANJA OPERASI** | **85.076.554.641** | **50.476.145.467** | **59,33** |
| 05.01.01 | Belanja Pegawai | 28.469.514.441 | 15.965.513.451 | 56,08 |
| 05.01.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.607.040.200 | 12.560.632.016 | 51,04 |
| 05.01.05 | Belanja Hibah | 32.000.000.000 | 21.950.000.000 | 68,59 |
| **05.02** | **BELANJA MODAL** | **1.419.369.490** | **158.477.000** | **11,17** |
| 05.02.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.419.369.490 | 158.477.000 | 11,17 |

* + 1. **Evaluasi Capaian RENSTRA**

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Gambaran umum pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 secara ringkas ditunjukan oleh tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Hasil Pencapaian RENSTRA

Pada RENSTRA Sekretariat Daerah 2016 – 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja Sasaran** | | **Capaian Tahun 2020** | **Tahun 2021** | | | **Target Akhir Renstra (2021)** | **Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra (%)** |
| **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** |
| ***Misi 1: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan*** | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Penataan dan Pengembangan Kelompok-Kelompok Usaha Masyarakat dan Koperasi | 1 | Persentase UMK yang berkembang usahanya | 60% | 45% | 45% | 100% | 45% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja Sasaran** | | **Capaian Tahun 2020** | **Tahun 2021** | | | **Target Akhir Renstra (2021)** | **Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra (%)** |
| **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** |
| ***Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Dan Religius*** | | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama | 2 | Persentase Aparatur mengikuti pengajian (Majelis Taklim Aparatur) | 37,50% | 85% | 75% | 88,24% | 85% | 88,24% |
| 3 | Persentase Penerimaan Zakat, infaq dan sedekah (ZIS) PNS | 90,02% | 95% | 74% | 77,89% | 95% | 77,89% |
| 4 | Persentase Lembaga Keagamaan berkinerja baik | 98,57% | 75% | 75% | 100% | 75% | 100% |
| ***Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional*** | | | | | | | | | |
| 3 | Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel | 5 | Persentase Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi | 100% | 95% | 92,54% | 97,41% | 95% | 97,41% |
| 6 | Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Keuangan Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Peningkatan Kapabilitas ASN yang Profesional | 7 | Rata-rata Gap Kompetensi | 96% | 0,3 | 0,3526 | 82.47% | 0,3 | 82.47% |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik | 8 | Persentase kerjasama aktif antar Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah dengan Instansi Pemerintah dan Antar Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga/Masyarakat | 114% | 100% | 143,33% | 143,33% | 100% | 143,33% |
| 9 | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) | 108,78% | 79,50% | 87,98 | 110,67% | 79,5 | 110,67% |
| 10 | Persentase BUMD Berkinerja Baik | 85% | 100% | 83% | 83% | 100% | 83% |
| 11 | Persentase produksi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan | 98,23% | 9% | 8,79% | 97,67% | 9% | 97,67% |
| 12 | Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13 | Jumlah Tatanan Kabupaten Sukabumi Sehat | 87,50% | 9 | 7 | 77,78% | 9 | 77,78% |
| 14 | Indeks Kepuasan Layanan Internal Sekretariat Daerah | 108,23% | 100% | 88,75% | 88,75% | 100% | 88,75% |
| 15 | Persentase Kesesuaian Indikator Kinerja Individu pada Perangkat Daerah dengan Kinerja Perangkat Daerah | 100.61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 16 | Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Sukabumi | 81,25% | A | B | B | A | 80,60% |
| 17 | Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) | 54,34% | 11,90% | 12,19% | 102,44% | 11,90% | 102,44% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja Sasaran** | | **Capaian Tahun 2020** | **Tahun 2021** | | | **Target Akhir Renstra (2021)** | **Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra (%)** |
| **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** |
| ***Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional*** | | | | | | | | | |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik | 18 | Kategori EKPPD | 100% | ST | ST | ST | ST | 100% |
| 19 | Kategori Rekomendasi DPRD atas LKPJ | 100% | B | B | B | B | 100% |
| 20 | Persentase Penetapan data dasar pemerintahan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 21 | Persentase Penegasan wilayah administrasi pemerintahan | 74% | 75% | 39% | 52% | 75% | 52% |
| 22 | Persentase sarana dan prasarana kondisi baik | 100% | 90% | 87% | 96,67% | 90% | 96,67% |
| 23 | Persentase kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang difasilitasi | 136% | 100% | 160% | 160% | 100% | 160% |
| 24 | Persentase Kesesuaian Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | 100% | 100% | 98,80% | 98,80% | 100% | 98,80% |
| 25 | Persentase Standarisasi ketatalaksanaan Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 26 | Persentase Penyelesaian Gugatan Perdata dan TUN | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 27 | Persentase penyelesaian pengaduan pelanggaran HAM | - | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 28 | Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 29 | Persentase Produk Hukum yang disosialisasikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 30 | Persentase kelengkapan persyaratan pemekaran Kabupaten Sukabumi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Tabel 2.4

Kategori Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021

Pada RENSTRA Sekretariat Daerah 2016 – 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja Sasaran** | | | **Capaian Tahun 2020** | | **Tahun 2021** | | | | | | **Kategori** |
| **Target** | | **Realisasi** | | **Capaian (%)** | |
| ***Misi 1: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Penataan dan Pengembangan Kelompok-Kelompok Usaha Masyarakat dan Koperasi | 1 | Persentase UMK yang berkembang usahanya | 60% | | 45% | | 45% | | 100% | | Sangat Tinggi | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja Sasaran** | | | **Capaian Tahun 2020** | | **Tahun 2021** | | | | | | **Kategori** |
| **Target** | | **Realisasi** | | **Capaian (%)** | |
| ***Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Dan Religius*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama | 2 | Persentase Aparatur mengikuti pengajian (Majelis Taklim Aparatur) | 37,50% | | 85% | | 75% | | 88,24% | | Tinggi | |
| 3 | Persentase Penerimaan Zakat, infaq dan sedekah (ZIS) PNS | 90,02% | | 95% | | 74% | | 77,89% | | Tinggi | |
| 4 | Persentase Lembaga Keagamaan berkinerja baik | 98,57% | | 75% | | 75% | | 100% | | Sangat Tinggi | |
| ***Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel | 5 | Persentase Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi | 100% | | 95% | | 92,54% | | 97,41% | | Sangat Tinggi | |
| 6 | Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Keuangan Tepat Waktu | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Sangat Tinggi | |
| 4 | Peningkatan Kapabilitas ASN yang Profesional | 7 | Rata-rata Gap Kompetensi | 96% | | 0,3 | | 0,3526 | | 82.47% | | Tinggi | |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik | 8 | Persentase kerjasama aktif antar Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah dengan Instansi Pemerintah dan Antar Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga/Masyarakat | 114% | | 100% | | 143,33% | | 143,33% | | Sangat Tinggi | |
| 9 | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) | 108,78% | | 79,50% | | 87,98 | | 110,67% | | Sangat Tinggi | |
| 10 | Persentase BUMD Berkinerja Baik | 85% | | 100% | | 83% | | 83% | | Tinggi | |
| 11 | Persentase produksi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan | 98,23% | | 9% | | 8,79% | | 97,67% | | Sangat Tinggi | |
| 12 | Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Sangat Tinggi | |
| 13 | Jumlah Tatanan Kabupaten Sukabumi Sehat | 87,50% | | 9 | | 7 | | 77,78% | | Tinggi | |
| 14 | Indeks Kepuasan Layanan Internal Sekretariat Daerah | 108,23% | | 100% | | 88,75% | | 88,75% | | Tinggi | |
| 15 | Persentase Kesesuaian Indikator Kinerja Individu pada Perangkat Daerah dengan Kinerja Perangkat Daerah | 100.61% | | 100% | | 100% | | 100% | | Sangat Tinggi | |
| 16 | Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Sukabumi | 81,25% | | A | | B | | B | | Tinggi | |
| 17 | Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) | 54,34% | | 11,90% | | 12,19% | | 102,44% | | Sangat Tinggi | |
| 18 | Kategori EKPPD | 100% | | ST | | ST | | ST | | Sangat Tinggi | |
| 19 | Kategori Rekomendasi DPRD atas LKPJ | 100% | | B | | B | | B | | Sangat Tinggi | |
| 20 | Persentase Penetapan data dasar pemerintahan | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Sangat Tinggi | |
| 21 | Persentase Penegasan wilayah administrasi pemerintahan | 74% | | 75% | | 39% | | 52% | | Rendah | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja Sasaran** | | | **Capaian Tahun 2020** | | **Tahun 2021** | | | | | | **Kategori** |
| **Target** | | **Realisasi** | | **Capaian (%)** | |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik | 22 | Persentase sarana dan prasarana kondisi baik | 100% | | 90% | | 87% | | 96,67% | | Sangat Tinggi | |
| 23 | Persentase kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang difasilitasi | 136% | | 100% | | 160% | | 160% | | Sangat Tinggi | |
| 24 | Persentase Kesesuaian Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | 100% | | 100% | | 98,80% | | 98,80% | | Sangat Tinggi | |
| 25 | Persentase Standarisasi ketatalaksanaan Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Sangat Tinggi | |
| 26 | Persentase Penyelesaian Gugatan Perdata dan TUN | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Sangat Tinggi | |
| 27 | Persentase penyelesaian pengaduan pelanggaran HAM | - | | 100% | | 0 | | 0 | | - | |
| 28 | Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Sangat Tinggi | |
| 29 | Persentase Produk Hukum yang disosialisasikan | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Sangat Tinggi | |
| 30 | Persentase kelengkapan persyaratan pemekaran Kabupaten Sukabumi | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Sangat Tinggi | |

Tabel 2.5

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

Pada RENSTRA Sekretariat Daerah 2016 – 2021

| **M I S I / SASARAN** | | **Kategori Penilaian Capaian Indikator** | | | | | **Jumlah** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sangat Tinggi** | **Tinggi** | **Sedang** | **Rendah** | **Sangat Rendah** |
| ***Misi 1: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang***  ***agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan*** | | | | | | | | |
| Sasaran 1 | Meningkatnya Penataan dan Pengembangan Kelompok-Kelompok Usaha Masyarakat dan Koperasi | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ***Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Dan Religius*** | | | | | | | | |
| Sasaran 2 | Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| ***Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional*** | | | | | | | | |
| Sasaran 3 | Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Sasaran 4 | Peningkatan Kapabilitas ASN yang Profesional | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Sasaran 5 | Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik | 17 | 4 | - | 1 | - | 22 |
| **JUMLAH** | | **21** | **7** | **-** | **1** | **-** | **29** |

Tabel 2.6

Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

| **No** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja Sasaran** | **% Capaian Indikator Kinerja yang ≥ 100%** | **Penyerapan Anggaran**  **(%)** | **Tingkat Efesiensi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meningkatnya Penataan dan Pengembangan Kelompok-Kelompok Usaha Masyarakat dan Koperasi | 1. Persentase UMK yang berkembang usahanya | 100% | 80,58 | 19,42 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama | 1. Persentase Lembaga Keagamaan berkinerja baik | 100% | 100 | 0 |
| 3 | Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel | 1. Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Keuangan Tepat Waktu | 100% | 100 | 0 |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik | 1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) | 110,67% | 90,65 | 20,02 |
| 1. Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan | 100% | 99,89 | 0,11 |
| 1. Persentase Kesesuaian Indikator Kinerja Individu pada Perangkat Daerah dengan Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 92,03 | 7,97 |
| 1. Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) | 102,44% | 80,07 | 22,.37 |
| 1. Kategori EKPPD | 100% | 97,74 | 2,26 |
| 1. Kategori Rekomendasi DPRD atas LKPJ | 100% | 98,76 | 1,24 |
| 1. Persentase Penetapan data dasar pemerintahan | 100% | 95,80 | 4,2 |
| 1. Persentase kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang difasilitasi | 160% | 99,84 | 0,16 |
| 1. Persentase Standarisasi ketatalaksanaan Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan | 100% | 90,65 | 9,35 |
| 1. Persentase Penyelesaian Gugatan Perdata dan TUN | 100% | 99,96 | 0,04 |
| 1. Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah | 100% | 100 | 0 |
| 1. Persentase Produk Hukum yang disosialisasikan | 100% | 99,15 | 0,85 |
| 1. Persentase kerjasama aktif antar Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah dengan Instansi Pemerintah dan Antar Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga/Masyarakat | 143,33% | 97,21 | 46,12 |
| 1. Persentase kelengkapan persyaratan pemekaran Kabupaten Sukabumi | 100% | 97,74 | 2,26 |

Tabel 2.7

Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja Sasaran** | **Tahun 2021** | | | **Nama Program** | **Tahun 2021** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Target** | **Reali**  **Sasi** | **% Realisasi** | **Pagu** | **Realisasi** | **% Reali**  **sasi** |
| 1 | Meningkatnya Penataan dan Pengembangan Kelompok-Kelompok Usaha Masyarakat dan Koperasi | 1. Persentase UMK yang berkembang usahanya | 45% | 45% | 100% | Program Perekonomian dan Pembangunan | 538.946.000 | 434.292.978 | 80.58 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama | 1. Persentase Penerimaan Zakat, infaq dan sedekah (ZIS) PNS | 85% | 75% | 88,24% | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 32.474.110.500 | 32.474.110.000 | 100.00 |
| 1. Persentase Aparatur mengikuti pengajian (Majelis Taklim Aparatur) | 95% | 74% | 77,89% |
| 1. Persentase Lembaga Keagamaan berkinerja baik | 75% | 75% | 100% |
| 3 | Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel | 1. Persentase penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi | 95% | 92,54% | 97,41% | Program Perekonomian dan Pembangunan | 284.330.000 | 283.738.500 | 99,79 |
| 1. Persentase penyelesaian dokumen Perencanaan dan keuangan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 1.470.265.000 | 1.446.213.200 | 98.36 |
| 4 | Peningkatan kapabilitas ASN yang profesional | 1. Rata-rata GAP Kompetensi | 0,30 | 0,3526 | 82,47% | 178.644.000 | 176.493.700 | 98,80 |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik | 1. Persentase sarana dan prasarana kondisi baik | 90% | 87% | 96,67% | 7.571.004.400 | 7.540.566.055 | 99,60 |
| 1. Indeks Kepuasan Layanan Internal Sekretariat Daerah | 100% | 88,75% | 88,75% | 14.759.707.100 | 14.477.569.391 | 98,09 |
| 1. Persentase kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang difasilitasi | 100% | 160% | 160% | 550.751.000 | 549.881.000 | 99,84 |
| 1. Persentase Kesesuaian Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | 100% | 98,80% | 98,80% | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 328.348.000 | 287.603.000 | 87,59 |
| 1. Persentase Standarisasi ketatalaksanaan Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan | 100% | 100% | 100% | 375.000.000 | 339.921.400 | 90,65 |
| 1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) | 79,5% | 87,98 | 110,67% |
| 1. Persentase Kesesuaian Indikator Kinerja Individu pada Perangkat Daerah dengan Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 44.172.000 | 40.649.900 | 92,03 |
| 1. Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) | 11,90% | 12,19% | 102,44% | 25.000.000 | 20.016.500 | 80,07 |
| 1. Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Sukabumi | A | B | 80,6% | 16.828.000 | 16.828.000 | 100.00 |
| 1. Persentase Penegasan wilayah administrasi pemerintahan | 75% | 39% | 52% | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 354.132.000 | 349.740.819 | 98,76 |
| 1. Kategori Rekomendasi DPRD atas LKPJ | 100% | 100% | 100% |
| 1. Persentase Penetapan Data Dasar Pemerintahan | 100% | 100% | 100% | 268.335.000 | 257.052.500 | 95,80 |
| 1. Persentase kelengkapan persyaratan pemekaran Kabupaten Sukabumi | 100% | 100% | 100% | 436.990.000 | 427.104.905 | 97,74 |
| 1. Kategori EKPPD | 100% | 100% | 100% |
| 1. Jumlah Tatanan Kabupaten Sukabumi Sehat | 9 | 7 | 77,78% | 505.034.000 | 505.034.000 | 100.00 |
| 1. Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah | 100% | 100% | 100% | 114.120.000 | 114.120.000 | 100.00 |
| 1. Persentase Penyelesaian Gugatan Perdata dan TUN | 100% | 100% | 100% | 349.940.000 | 349.810.000 | 99,96 |
| 1. Persentase penyelesaian pengaduan pelanggaran HAM | 100% | 0,00 | 0,00 |
| 1. Persentase Produk Hukum yang disosialisasikan | 100% | 100% | 100% | 206.108.000 | 204.358.000 | 99,15 |
| 1. Persentase kerjasama aktif antar Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah dengan Instansi Pemerintah dan Antar Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga/Masyarakat | 100% | 143,33% | 143,33% | 225.682.000 | 219.377.726 | 97,21 |
| 1. Persentase BUMD Berkinerja Baik | 100% | 83% | 83% | Program Perkonomian dan Pembangunan | 1.164.213.000 | 1.137.714.843 | 97,72 |
| 1. Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan | 100% | 100% | 100% | 532.948.000 | 532.374.689 | 99,89 |
| 1. Persentase produksi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan | 9% | 8,79% | 97,67% | 711.121.000 | 604.471.000 | 85,00 |

Tabel 2.8

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran terhadap Capaian Anggaran

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S A S A R A N** | | **CAPAIAN**  **KINERJA**  **(%)** | **ANGGARAN** | |
| **REALISASI**  **(Rp.)** | **CAPAIAN**  **(%)** |
| Sasaran 1 | Meningkatnya Penataan dan Pengembangan Kelompok-Kelompok Usaha Masyarakat dan Koperasi | 100 | 434.292.978 | 80.58 |
| Sasaran 2 | Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama | 88,71 | 32.474.110.000 | 100.00 |
| Sasaran 3 | Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel | 98,71 | 1.729.951.700 | 99,08 |
| Sasaran 4 | Peningkatan Kapabilitas ASN yang Profesional | 82,47 | 176.493.700 | 98,80 |
| Sasaran 5 | Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik | 99,62 | 27.974.193.728 | 79,09 |
| **RATA-RATA** | | **93,90** | **12.557.808.421** | **91,51** |

* 1. **Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 dan PP Nomor 38 Tahun 2007**.** Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kineja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi sesuai dengan tugas dan fungsi dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat dibagi kedalam tiga peran utama, yaitu:

* + - 1. Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan

Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan yang ditangani Sekretariat Daerah merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan daerah, administrasi pemerintahan, kemasyarakatan, pengelolaan sumber daya aparatur,keuangan, sarana/prasarana pemerintah daerah yang diimplementasikan ke dalam rencana strategis sekretariat daerah.

* + - 1. Pelayanan sebagai koordinator pembangunan daerah

Pelayanan sebagai koordinator perumusan kebijakan pembangunan daerah, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

* + - 1. Pelayanan Administrasi

Sekretariat Daerah melakukan kajian, telaahan, evaluasi kebijakan, serta penyediaan data dan informasi sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan pelayanan administrative kepada Perangkat Daerah dilingkup pemerintah daerah.

Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 100 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ini tidak terlepas dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah, dan pelayanan administratif perangkat daerah

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Sukabumi adalah :

1. Bagian Tata Pemerintahan, jenis pelayanan :
   * + Layanan administrasi pemerintahan
     + Layanan administrasi kewilayahan
     + Layanan pelaksanaan otonomi daerah
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, jenis pelayanan :
   * + Layanan pembinaan mental spiritual
     + Layanan kesejahteraan sosial
     + Layanan kesejahteraan masyarakat
3. Bagian Hukum, jenis pelayanan :

* Layanan penyusunan produk hukum daerah
* Layanan bantuan hukum
* Layanan dokumentasi produk hukum dan informasi hukum

1. Bagian Kerjasama, jenis pelayanan :

* Layanan kerjasama dalam negeri
* Layanan kerjasama luar negeri
* Layanan evaluasi pelaksanaan kerjasama

1. Bagian Perekonomian, jenis pelayanan :

* Layanan pengelolaan BUMD dan BLUD
* Layanan pengendalian dan distribusi perekonomian
* Layanan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil

1. Bagian Administrasi Pembangunan, jenis pelayanan :

* Layanan penyusunan program pembangunan
* Layanan pengendalian dan evaluasi program pembangunan
* Layanan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan

1. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, jenis pelayanan :

* Layanan pengadaan barang dan jasa
* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
* Layanan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa

1. Bagian Sumber Daya Alam, jenis pelayanan :

* Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
* Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
* Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

1. Bagian Umum, jenis pelayanan :

* Layanan Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
* Layanan Perlengkapan
* Layanan Rumah Tangga

1. Bagian Organisasi, jenis pelayanan :

* Layanan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
* Layanan Tata Laksana dan Pelayanan Publik
* Layanan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

1. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, jenis pelayanan :

* Layanan Keprotokolan
* Layanan Komunikasi Pimpinan
* Layanan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

1. Bagian Perencanaan dan Keuangan, jenis pelayanan :
   * + Layanan Perencanaan Setda
     + Layanan Keuangan Setda
     + Layanan Pelaporan Setda

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Capaian Tahun 2019 | Tahun 2020 | | | Target Akhir Renstra  (2021) | Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra (%) |
| Target | Realisasi | % Capaian |
| ***Misi 1: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan*** | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Penataan dan Pengembangan Kelompok-Kelompok Usaha Masyarakat dan Koperasi | Persentase UMK yang berkembang usahanya | 80% | 42% | 25% | 60% | 45% | 56% |
| ***Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Dan Religius*** | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama | Persentase Aparatur mengikuti pengajian (Majelis Taklim Aparatur) | 75% | 80% | 30% | 37.50% | 85% | 35% |
| Persentase Penerimaan Zakat, infaq dan sedekah (ZIS) PNS | 82.95% | 90% | 81.02% | 90.02% | 95% | 85% |
| Persentase Lembaga Keagamaan berkinerja baik | 65% | 70% | 69% | 98.57% | 75% | 92% |
| ***Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional*** | | | | | | | | |
| 3 | Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel | Persentase Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi | 95.11% | 95% | 95% | 100% | 100% | 95% |
| Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Keuangan Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Peningkatan Kapabilitas ASN yang Profesional | Rata-rata Gap Kompetensi | 0,53 | 0.45 | 0.46 | 96% | 0.30 | 44.5% |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik | Persentase kerjasama aktif antar Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah dengan Instansi Pemerintah dan Antar Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga/Masyarakat | 42% | 50% | 57% | 114% | 60% | 95% |
| Indeks kepuasan masyarakat (IKM) | 79.49% | 79 | 85,94 | 108,78% | 79,50 | 108.10% |
| Persentase BUMD Berkinerja Baik | 80% | 100% | 85% | 85% | 100% | 85% |
| Persentase produksi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan | 8% | 8,50% | 8,35% | 98.23% | 9% | 92.77% |
| Persentase Jumlah Informasi Yang dipublikasikan melalui media yang dikelola pemerintah daerah, media massa, media cetak dan media online | 100% | 100% | - | - | 100% | - |
| Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Jumlah Tatanan Kabupaten Sukabumi Sehat | 7 | 8 | 7 | 87.50% | 9 | 77.77% |
| Indeks Kepuasan Layanan Internal Sekretariat Daerah | 79,492 | 85% | 92% | 108.23% | 90% | 102.22% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Capaian Tahun 2019 | Tahun 2020 | | | Target Akhir Renstra  (2021) | Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra (%) |
| Target | Realisasi | % Capaian |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik | Persentase Kesesuaian Indikator Kinerja Individu pada Perangkat Daerah dengan Kinerja Perangkat Daerah | 60% | 80% | 80.48% | 100.61% | 100% | 80.48% |
| Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Sukabumi | B | A | B | 81.25% | A | 81.25% |
| Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) | 6.90% | 9.20% | 5% | 54.34% | 11.49% | 43.51% |
| Kategori EKPPD | ST | ST | ST | 100% | ST | 100% |
| Kategori Rekomendasi DPRD atas LKPJ | B | B | B | 100% | B | 100% |
| Persentase Penetapan data dasar pemerintahan | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% | 75% |
| Persentase Penegasan wilayah administrasi pemerintahan | 30% | 50% | 37% | 74% | 75% | 49% |
| Persentase sarana dan prasarana kondisi baik | 78.50% | 90% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| Persentase kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang difasilitasi | 100% | 100% | 136% | 136% | 100% | 136% |
| Persentase Kesesuaian Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase Standarisasi ketatalaksanaan Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase Penyelesaian Gugatan Perdata dan TUN | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase penyelesaian pengaduan pelanggaran HAM | 100% | 100% | 0 | - | 100% | - |
| Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase Produk Hukum yang disosialisasikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase kelengkapan persyaratan pemekaran Kabupaten Sukabumi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

* 1. **Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sekretariat merupakan Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi auxilary staf dan fungsi advisory staf. Fungsi auxilary staf yaitu pelayanan data, informasi dan sistem pendukung pengambilan keputusan/ perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Fungsi advisory staf Pelayanan telaahan, perumusan saran dan pertimbangan teknis pelaksanaan fungsi-fungsi dan urusan pemerintahan daerah Penyelenggaraan Pelayanan di Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
5. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selaku institusi yang memberikan supporting system kepada Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran sentral mengkoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, penatalaksanaan organisasi, serta memberikan fasilitasi administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Untuk itu Sekretariat Daerah harus mampu mengukur kinerja pelayanan yang sudah dilaksanakan, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan, serta mengetahui tantangan atau peluang yang dimiliki dan memformulasikan isu-isu penting yang merupakan rekomendasi atau catatan stretegis untuk diaplikasikan dalam program dan kegiatan akan dilaksanakan.

Tabel 2.9

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspek Kajian | Capaian/ Kondisi Saat Ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan PD |
| Internal | Eksternal |
| Produk hukum yang mencakup kualitas, kejelasan objek hukum | Belum dapat terpenuhinya produk hokum yang memenuhi kebutuhan baik secara kuantitas, kualitas dan dapat tersusun tepat waktu | Pedoman pembentukan peraturan, Peraturan di  tingkat pusat dan Program Pembentukan Peraturan Daerah | SDM | Koordinasi dengan dengan Perangkat Daerah pengusul Raperda dan DPRD | Kesepahaman SDM dalam melayani kebutuhan pendampingan penyusunan peraturan |
| Kelembagaan | Sudah dilakukan Evaluasi Kelembagaan untuk diselaraskan dengan RPJMD | PP18/2016 RPJMD PP No. 72 Tahun 2019 | Telah Tersedia Kajian Evaluasi Kelembagaan berbasis Proses Bisnis | Pemerintah Provinsi tidak sepenuhnya menyetujui konsep Raperda perubahan kelembagaan yang diusulkan | Evaluasi Kelembagaan mendasarkan pada Pemetaan Urusan berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 Bukan berdasarkan Kajian Proses Bisnis sebagaimana diatur pada PermenPAN No. 19 Tahun 2018 |
| Pengendali an kegiatan | Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan | Realisasi Kegiatan | Kuantitas SDM | PPTK masih kurang paham dalam menyusun perencanaan kegiatan | Keterbatasan jumlah SDM dalam melaksanakan pengendalian kegiatan |
| Penyusunan Penawaran Kerjasama Daerah | Belum mencapai target yang ditetapkan | Belum ada | Kurangnya SDM yang kompeten dalam penyusunan proposal penawaran kerjasama | Perangkat Daerah teknis belum secara aktif mendukung materi/konten yang akan dimasukan dalam penawaran kerjasama | Pelaksanaan kerjasama masih terbatas dalam tataran administrasi, fasilitasi, dan dokumentasi |
| Kualitas layanan keprotokolan | Masih diperlukan peningkatan pemahaman terhadap pelayanan administrasi, pelayanan kedinasan pimpinan dan aturan-aturan keprotokolan | Pelayanan kedinasan dan keprotokolan yang diberikan selama ini masih berdasar kebiasaan yang telah dijalani selama ini dan berdasarkan masukan dan diskusi dengan protocol pemda  dan protocol daerah lain | Adanya personil baru, intensitas kerja yang sangat tinggi | Belum adanya peraturan turunan / teknis tentang keprotokolan, belum pahamnya audiens mengenai aturan keprotokolan | Kurang optimalnya pelayanan administrasi dan kedinasan pimpinan serta bagian secara umum dan kurang optimalnya pelayanan kedinasan pimpinan dan keprotokolan |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspek Kajian | Capaian/ Kondisi Saat Ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan PD |
| Internal | Eksternal |
| Pelayanan pengadaan barang / jasa | Evaluasi dokumen penawaran pengadaan barang/jasa terhadap permasalahan K3 kurang maksimal. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) | Ketersediaan SDM yang memahami Sistem Manajemen K3 Konstruksi | Belum ada anggota Pokja yang yang memiliki Sertifikat Ahli K3 Konstruksi/ Petugas K3 Konstruksi | Kuota pelaksanaan Pelatihan Sistem manajemen K3 Konstruksi terbatas |
| Kewajiban Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat | Laporan tersusun tepat waktu | * UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah * PP Nomor 13/2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD * Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat | Kuantitas SDM yang memahami penyusunan laporan | * Komitmen dari Perangkat Daerah terkait untuk mensuplay data yang diperlukan dalam penyusunan laporan * Terbitnya peraturan/pedoman baru terkait penyusunan laporan | Validitas dan kelengkapan data yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah terkait belum memadai dan memerlukan waktu yang agak lama |
| Fasilitasi kegiatan keagamaan belum optimal | Fasilitasi kehidupan bergama | Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat | Ketidakjelasan tugas dan fungsi yang diatur dalam perbup | Tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan | Tidak berimbangnya anggaran dengan permohonan fasilitasi |

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi dapat dibagi menjadi tiga isu utama, yaitu:

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
   1. Belum terpenuhinya kebutuhan produk hukum yang mencakup kualitas dan kejelasan objek hukum.
2. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
   1. Belum memadainya database Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga masih harus ditingkatkan lagi
   2. Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan.
   3. Proses pemilihan penyedia barang/jasa belum sesuai dengan RUP.
3. Isu terkait pelayanan publik.
   1. Kelembagaan yang belum selaras dengan RPJMD Kota.
   2. Kualitas layanan keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan.
   3. Kualitas pelayanan administrasi umum, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan dan penatausahaan masih perlu ditingkatkan
   4. **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi adalah meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas, dan meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut :

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rancangan Awal RKPD** | | | | | **Hasil Analisis Kebutuhan** | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | |  | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | |  |  |
| **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | **143,000,000,000** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | **143,000,000,000** |  |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Administrasi Umum yang terlaksana** | **Kab. Sukabumi** | **100 %** | **76,950,000,000** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Administrasi Umum yang terlaksana** | **Kab. Sukabumi** | **100 %** | **76,950,000,000** |  |
| **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase penyelesaian dokumen Perencanaan, keuangan dan Pelaporan tepat waktu** | **Kab. Sukabumi** | **100 %** | **530,000,000** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase penyelesaian dokumen Perencanaan, keuangan dan Pelaporan tepat waktu** | **Kab. Sukabumi** | **100 %** | **530,000,000** |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Sukabumi | 6 Dokumen | 125,000,000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Sukabumi | 6 Dokumen | 125,000,000 |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 15,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 15,000,000 |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 15,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 15,000,000 |  |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 25,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 25,000,000 |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 25,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 25,000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Sukabumi | 5 Dokumen | 175,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Sukabumi | 5 Dokumen | 175,000,000 |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Sukabumi | 1 Laporan | 150,000,000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Sukabumi | 1 Laporan | 150,000,000 |  |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah** | **Kab. Sukabumi** | **8 Dokumen** | **36,225,000,000** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah** | **Kab. Sukabumi** | **8 Dokumen** | **36,225,000,000** |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Sukabumi | 12 Dokumen | 36,000,000,000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Sukabumi | 12 Dokumen | 36,000,000,000 |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 100,000,000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 100,000,000 |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kab. Sukabumi | 12 Dokumen | 25,000,000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kab. Sukabumi | 12 Dokumen | 25,000,000 |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Sukabumi | 2 Laporan | 25,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Sukabumi | 2 Laporan | 25,000,000 |  |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 25,000,000 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 25,000,000 |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD | Kab. Sukabumi | 18 Laporan | 25,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD | Kab. Sukabumi | 18 Laporan | 25,000,000 |  |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 25,000,000 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 25,000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Kab. Sukabumi** | **1 Dokumen** | **1,620,216,200** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Kab. Sukabumi** | **1 Dokumen** | **1,620,216,200** |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 55,255,000 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 55,255,000 |  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 1,249,987,200 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 1,249,987,200 |  |
| Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Laporan | 75,000,000 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Laporan | 75,000,000 |  |
| Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Laporan | 50,000,000 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Laporan | 50,000,000 |  |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Laporan | 25,000,000 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Laporan | 25,000,000 |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Sukabumi | 12 Laporan | 150,000,000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Sukabumi | 12 Laporan | 150,000,000 |  |
| Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 14,974,000 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 14,974,000 |  |
| **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Kab. Sukabumi** | **1 Dokumen** | **1,830,000,000** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Kab. Sukabumi** | **1 Dokumen** | **1,830,000,000** |  |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Kab. Sukabumi | 1 Unit | 350,000,000 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Kab. Sukabumi | 1 Unit | 350,000,000 |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Kab. Sukabumi | 1 Paket | 400,000,000 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Kab. Sukabumi | 1 Paket | 400,000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 100,000,000 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 100,000,000 |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Kab. Sukabumi | 12 Dokumen | 100,000,000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Kab. Sukabumi | 12 Dokumen | 100,000,000 |  |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 100,000,000 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 100,000,000 |  |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Kab. Sukabumi | 50 Orang | 450,000,000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Kab. Sukabumi | 50 Orang | 450,000,000 |  |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Sukabumi | 180 Orang | 160,000,000 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Sukabumi | 180 Orang | 160,000,000 |  |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Sukabumi | 100 Orang | 170,000,000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Sukabumi | 100 Orang | 170,000,000 |  |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kab. Sukabumi** | **12 Dokumen** | **9,000,654,900** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kab. Sukabumi** | **12 Dokumen** | **9,000,654,900** |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 1 Paket | 199,999,400 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 1 Paket | 199,999,400 |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 3 Paket | 520,007,500 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 3 Paket | 520,007,500 |  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 4 Paket | 299,999,000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 4 Paket | 299,999,000 |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 4 Paket | 3,522,500,000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 4 Paket | 3,522,500,000 |  |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 4 Paket | 757,158,000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 4 Paket | 757,158,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 76,000,000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 76,000,000 |  |
| Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 3 Paket | 250,000,000 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 3 Paket | 250,000,000 |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Sukabumi | 12 Laporan | 700,000,000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Sukabumi | 12 Laporan | 700,000,000 |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Sukabumi | 12 Laporan | 2,499,991,000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Sukabumi | 12 Laporan | 2,499,991,000 |  |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 150,000,000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 150,000,000 |  |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 25,000,000 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 25,000,000 |  |
| **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan** | **Kab. Sukabumi** | **9 Dokumen** | **7,917,870,100** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan** | **Kab. Sukabumi** | **9 Dokumen** | **7,917,870,100** |  |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 12 Unit | 3,971,776,600 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 12 Unit | 3,971,776,600 |  |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 6 Unit | 2,019,444,560 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 6 Unit | 2,019,444,560 |  |
| Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 6 Unit | 349,800,000 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 6 Unit | 349,800,000 |  |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 8 Unit | 649,310,000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 8 Unit | 649,310,000 |  |
| Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 5 Unit | 25,000,000 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 5 Unit | 25,000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 1 Unit | 300,000,000 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 1 Unit | 300,000,000 |  |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 2 Unit | 294,533,200 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 2 Unit | 294,533,200 |  |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 3 Unit | 308,005,740 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 3 Unit | 308,005,740 |  |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan** | **Kab. Sukabumi** | **4 Dokumen** | **6,091,452,800** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan** | **Kab. Sukabumi** | **4 Dokumen** | **6,091,452,800** |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Sukabumi | 12 Laporan | 99,990,000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Sukabumi | 12 Laporan | 99,990,000 |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 12 Laporan | 1,600,000,000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 12 Laporan | 1,600,000,000 |  |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 12 Laporan | 406,600,000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 12 Laporan | 406,600,000 |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 12 Laporan | 3,984,862,800 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 12 Laporan | 3,984,862,800 |  |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara** | **Kab. Sukabumi** | **9 Dokumen** | **8,022,406,000** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara** | **Kab. Sukabumi** | **9 Dokumen** | **8,022,406,000** |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kab. Sukabumi | 55 Unit | 2,299,760,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kab. Sukabumi | 55 Unit | 2,299,760,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kab. Sukabumi | 50 Unit | 2,749,120,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kab. Sukabumi | 50 Unit | 2,749,120,000 |  |
| Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Kab. Sukabumi | 8 Unit | 98,550,000 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Kab. Sukabumi | 8 Unit | 98,550,000 |  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kab. Sukabumi | 12 Unit | 299,994,000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kab. Sukabumi | 12 Unit | 299,994,000 |  |
| Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Kab. Sukabumi | 6 Unit | 200,000,000 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Kab. Sukabumi | 6 Unit | 200,000,000 |  |
| Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Kab. Sukabumi | 2 Unit | 50,000,000 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Kab. Sukabumi | 2 Unit | 50,000,000 |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kab. Sukabumi | 6 Unit | 1,699,984,000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kab. Sukabumi | 6 Unit | 1,699,984,000 |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kab. Sukabumi | 6 Unit | 525,000,000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kab. Sukabumi | 6 Unit | 525,000,000 |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kab. Sukabumi | 6 Unit | 99,998,000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kab. Sukabumi | 6 Unit | 99,998,000 |  |
| **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **Jumlah dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **Kab. Sukabumi** | **4 Dokumen** | **2,182,400,000** | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **Jumlah dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **Kab. Sukabumi** | **4 Dokumen** | **2,182,400,000** |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Sukabumi | 2 orang | 250,000,000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Sukabumi | 2 orang | 250,000,000 |  |
| Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 6 Paket | 132,400,000 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 6 Paket | 132,400,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Sukabumi | 8 Orang | 300,000,000 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Sukabumi | 8 Orang | 300,000,000 |  |
| Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Sukabumi | 2 orang | 1,500,000,000 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Sukabumi | 2 orang | 1,500,000,000 |  |
| **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **Jumlah paket Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **Kab. Sukabumi** | **3 Paket** | **780,000,000** | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **Jumlah paket Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **Kab. Sukabumi** | **3 Paket** | **780,000,000** |  |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 2 Paket | 318,000,000 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 2 Paket | 318,000,000 |  |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 2 Paket | 306,000,000 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 2 Paket | 306,000,000 |  |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 1 Paket | 156,000,000 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | Kab. Sukabumi | 1 Paket | 156,000,000 |  |
| **Penataan Organisasi** | **Jumlah dokumen penataan organisasi** | **Kab. Sukabumi** | **3 Dokumen** | **1,500,000,000** | **Penataan Organisasi** | **Jumlah dokumen penataan organisasi** | **Kab. Sukabumi** | **3 Dokumen** | **1,500,000,000** |  |
| Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 500,000,000 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 500,000,000 |  |
| Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Kab. Sukabumi | 3 Laporan | 450,000,000 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Kab. Sukabumi | 3 Laporan | 450,000,000 |  |
| Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Kab. Sukabumi | 2 Dokumen | 200,000,000 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Kab. Sukabumi | 2 Dokumen | 200,000,000 |  |
| Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 150,000,000 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 150,000,000 |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Kab. Sukabumi | 3 Dokumen | 200,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Kab. Sukabumi | 3 Dokumen | 200,000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **Jumlah laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **Kab. Sukabumi** | **3 Laporan** | **1,250,000,000** | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **Jumlah laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **Kab. Sukabumi** | **3 Laporan** | **1,250,000,000** |  |
| Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | Kab. Sukabumi | 12 Laporan | 480,000,000 | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | Kab. Sukabumi | 12 Laporan | 480,000,000 |  |
| Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Kab. Sukabumi | 12 Laporan | 320,000,000 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Kab. Sukabumi | 12 Laporan | 320,000,000 |  |
| Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Kab. Sukabumi | 12 Laporan | 450,000,000 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Kab. Sukabumi | 12 Laporan | 450,000,000 |  |
| **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **Persentase Realisasi Kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana** | **Kab. Sukabumi** | **100 %** | **61,000,000,000** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **Persentase Realisasi Kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana** | **Kab. Sukabumi** | **100 %** | **61,000,000,000** |  |
| **Administrasi Tata Pemerintahan** | **Jumlah dokumen Administrasi Tata Pemerintahan** | **Kab. Sukabumi** | **3 Dokumen** | **1,650,000,000** | **Administrasi Tata Pemerintahan** | **Jumlah dokumen Administrasi Tata Pemerintahan** | **Kab. Sukabumi** | **3 Dokumen** | **1,650,000,000** |  |
| Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | Kab. Sukabumi | 2 dokumen | 500,000,000 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | Kab. Sukabumi | 2 dokumen | 500,000,000 |  |
| Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Kab. Sukabumi | 4 Dokumen | 350,000,000 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Kab. Sukabumi | 4 Dokumen | 350,000,000 |  |
| Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Kab. Sukabumi | 5 Dokumen | 800,000,000 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Kab. Sukabumi | 5 Dokumen | 800,000,000 |  |
| **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **Jumlah dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **Kab. Sukabumi** | **3 Dokumen** | **56,600,000,000** | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **Jumlah dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **Kab. Sukabumi** | **3 Dokumen** | **56,600,000,000** |  |
| Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Kab. Sukabumi | 3 dokumen | 55,500,000,000 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Kab. Sukabumi | 3 dokumen | 55,500,000,000 |  |
| Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Kab. Sukabumi | 3 Dokumen | 350,000,000 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Kab. Sukabumi | 3 Dokumen | 350,000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Kab. Sukabumi | 3 Dokumen | 350,000,000 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Kab. Sukabumi | 3 Dokumen | 350,000,000 |  |
| Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Kab. Sukabumi | 75 Keluarga | 200,000,000 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Kab. Sukabumi | 75 Keluarga | 200,000,000 |  |
| Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Kab. Sukabumi | 100 Keluarga | 200,000,000 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Kab. Sukabumi | 100 Keluarga | 200,000,000 |  |
| **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | **Jumlah dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | **Kab. Sukabumi** | **3 Dokumen** | **1,600,000,000** | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | **Jumlah dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | **Kab. Sukabumi** | **3 Dokumen** | **1,600,000,000** |  |
| Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | Kab. Sukabumi | 100 Dokumen | 400,000,000 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | Kab. Sukabumi | 100 Dokumen | 400,000,000 |  |
| Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | Kab. Sukabumi | 12 Kasus | 850,000,000 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | Kab. Sukabumi | 12 Kasus | 850,000,000 |  |
| Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | Kab. Sukabumi | 3 Dokumen | 350,000,000 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | Kab. Sukabumi | 3 Dokumen | 350,000,000 |  |
| **Fasilitasi Kerja Sama Daerah** | **Jumlah dokumen Fasilitasi Kerja Sama Daerah** | **Kab. Sukabumi** | **3 Dokumen** | **1,150,000,000** | **Fasilitasi Kerja Sama Daerah** | **Jumlah dokumen Fasilitasi Kerja Sama Daerah** | **Kab. Sukabumi** | **3 Dokumen** | **1,150,000,000** |  |
| Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Kab. Sukabumi | 12 Dokumen | 550,000,000 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Kab. Sukabumi | 12 Dokumen | 550,000,000 |  |
| Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Kab. Sukabumi | 2 Dokumen | 300,000,000 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Kab. Sukabumi | 2 Dokumen | 300,000,000 |  |
| Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Kab. Sukabumi | 5 Laporan | 300,000,000 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Kab. Sukabumi | 5 Laporan | 300,000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Perkonomian dan Pembangunan yang terlaksana** | **Kab. Sukabumi** | **100 %** | **5,050,000,000** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Perkonomian dan Pembangunan yang terlaksana** | **Kab. Sukabumi** | **100 %** | **5,050,000,000** |  |
| **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | **Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | **Kab. Sukabumi** | **3 Dokumen** | **1,450,000,000** | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | **Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | **Kab. Sukabumi** | **3 Dokumen** | **1,450,000,000** |  |
| Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Kab. Sukabumi | 4 Dokumen | 400,000,000 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Kab. Sukabumi | 4 Dokumen | 400,000,000 |  |
| Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Kab. Sukabumi | 2 Laporan | 450,000,000 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Kab. Sukabumi | 2 Laporan | 450,000,000 |  |
| Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 300,000,000 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 300,000,000 |  |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 50,000,000 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 50,000,000 |  |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 250,000,000 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | Kab. Sukabumi | 1 Dokumen | 250,000,000 |  |
| **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | **Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | **Kab. Sukabumi** | **3 Dokumen** | **750,000,000** | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | **Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | **Kab. Sukabumi** | **3 Dokumen** | **750,000,000** |  |
| Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | Kab. Sukabumi | 5 Dokumen | 250,000,000 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | Kab. Sukabumi | 5 Dokumen | 250,000,000 |  |
| Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Kab. Sukabumi | 6 Laporan | 250,000,000 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Kab. Sukabumi | 6 Laporan | 250,000,000 |  |
| Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Kab. Sukabumi | 5 Laporan | 250,000,000 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Kab. Sukabumi | 5 Laporan | 250,000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | **Jumlah dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | **Kab. Sukabumi** | **3 Dokumen** | **1,800,000,000** | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | **Jumlah dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | **Kab. Sukabumi** | **3 Dokumen** | **1,800,000,000** |  |
| Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Kab. Sukabumi | 12 dokumen | 550,000,000 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Kab. Sukabumi | 12 dokumen | 550,000,000 |  |
| Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Kab. Sukabumi | 2 Dokumen | 650,000,000 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Kab. Sukabumi | 2 Dokumen | 650,000,000 |  |
| Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Kab. Sukabumi | 75 Orang | 600,000,000 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Kab. Sukabumi | 75 Orang | 600,000,000 |  |
| **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** | **Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam** | **Kab. Sukabumi** | **3 Dokumen** | **1,050,000,000** | **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** | **Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam** | **Kab. Sukabumi** | **3 Dokumen** | **1,050,000,000** |  |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | Kab. Sukabumi | 2 Dokumen | 450,000,000 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | Kab. Sukabumi | 2 Dokumen | 450,000,000 |  |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | Kab. Sukabumi | 2 Dokumen | 300,000,000 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | Kab. Sukabumi | 2 Dokumen | 300,000,000 |  |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | Kab. Sukabumi | 3 Dokumen | 300,000,000 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | Kab. Sukabumi | 3 Dokumen | 300,000,000 |  |

* 1. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah**

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dengan tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi berperan dalam mengkoordinasikan dalam perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana. Tantangan pelayanan Sekretariat Daerah yang harus dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Tuntutan dalam meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Kewilayahan
4. Tuntutan dalam menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, berupa upaya mewujudkan Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Tuntutan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan public dan akuntabilitas kinerja
6. Tuntutan dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama (daerah) dalam dan luar negeri.
7. Tuntutan dalam meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan, Meningkatkan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, kebijakan pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta), membina BUMD serta mewujudkan kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama

Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut :

Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian informasi yang cepat dan tepat.

Berkembangnya sarana komunikasi global, memberikan peluang untuk mempromosikan secara efektif mengenai profil Kabupaten dan potensi di segala bidang yang ada.

Dukungan kebijakan dan anggaran dari kepala daerah dalam rangka peningkatan kinerja sekretariat daerah

* 1. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada tahun 2023 program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Sekretariat Daerah terkait fasilitasi bantuan hibah. Proyek yang memiliki nilai strategis dan berdaya ungkit terhadap capaian visi dan misi Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026. Diantara proyek-proyek prioritas tersebut yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah diantaranya :

1. Peningkatan kesejahteraan guru dan BOP Madrasah Diniah (MD)/Lembaga Pendidikan Alquran (LPQ)

Dalam rangka mengurangi angka putus sekolah, memberikan kesempatan yang setara bagi santri dan mewujudkan perhatian pemerintah daerah bagi santri dan guru MD/LPQ sebagaimana visi misi mewujudkan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang religius, maka akan disiapkan bantuan BOP MD/LTQ untuk meringankan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan keagamaan

1. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan (Pontren, MDTA, Majelis Taklim) serta tempat /rumah ibadah (masjid, mushola)

Selain bantuan biaya operasional bagi MD/LPQ, keberpihakan terhadap pendidikan keagamaan dan rumah ibadah bagi masyarakat juga menjadi perhatian dengan menyiapkan anggaran untuk membangun fasilitas dan meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung terselenggaranya pendidikan dan pelaksanaan ibadah bagi masyarakat

1. Fasilitasi pengembangan usaha IKM dan UMKM berbasis masjid (BUMI : Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi)

BUMI adalah program pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. Sasaran program ini adalah masyarakat miskin yang merupakan jamaah masjid yang dipilih berdasarkan proses seleksi meliputi tingkat kehadiran dan keaktifan di masjid. Tujuan dari program BUMI adalah agar masyarakat miskin/dhuafa mempunyai LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) sendiri, sehingga tidak menemukan kesulitan akses sumber pembiayaan untuk pengembangan usahanya. Dana pembiayaan tersebut adalah dana kelola bersama, dimana di akhir program/ exit program berdirinya Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Pendekatan program melalui Bina Ruhiyah (kecerdasan spiritual) dan Bina Rupiah (kecerdasan finansial) dimana tempat dilaksanakannya program ini di sebuah Masjid. Masjid sebagai pusat kegiatan spiritual akan mampu mendekatkan diri peserta kepada Allah SWT

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

1. **Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Tema pembangunan nasional pada tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”**. Pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;

2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;

3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;

4. Mendorong pemulihan dunia usaha;

5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;

6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);

7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan

8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Tema atau fokus pembangunan Jawa Barat pada tahun 2023 yaitu **“Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”**. Rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 merupakan pelaksanaan pembangunan tahun akhir pada RPJMD Jawa Barat periode 2018-2023. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dari indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Guna mencapai target pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Jawa Barat. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu masukan bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2023, amanat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 berdasarkan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 adalah:

Reformasi sistem kesehatan daerah

Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi

Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan

Reformasi sistem perlindungan social

Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan

Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana

Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah

Gerakan membangun desa.

Pendidikan agama dan tempat ibadah juara

Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup

Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata

Berdasarkan arah kebijakan Kabupaten Sukabumi serta untuk mendukung tema pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, maka tema pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2023 yaitu “Pemantapan Daya Saing Ekonomi Melalui Peningkatan Infrastruktur Daerah”. Peningkatan pelayanan publik perlu dilakukan dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam hal ini, inovasi pelayanan publik diarahkan sebagai respon terhadap kondisi pandemi Covid-19. Inovasi tersebut dilakukan dengan cara penguatan sistem pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, infrastruktur pelayanan dasar, dan ekonomi daerah. Pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2023 yaitu:

* + 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan.
    2. Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah.
    3. Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan
    4. Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial.
    5. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah.
    6. Peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas layanan publik

Pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan sinkronisasi dan keterkaitan dengan tema pembangunan dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2023, tema pembangunan nasional adalah “**Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**”; tema pembangunan Provinsi Jawa Barat adalah **“Mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat**”; dan tema pembangunan kabupaten sukabumi adalah “**Pemantapan pelayanan publik dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi daerah**”. Ketiga tema tersebut saling terkait satu sama lain dengan benang merah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah dari sektor ekonomi

Peningkatan pelayanan publik perlu dilakukan dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam hal ini, inovasi pelayanan publik diarahkan sebagai respon terhadap kondisi pandemi Covid-19. Inovasi tersebut dilakukan dengan cara penguatan sistem pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, infrastruktur pelayanan dasar, dan ekonomi daerah. Pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2023 yaitu :

* + 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan.
    2. Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah.
    3. Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan
    4. Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial.
    5. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah.
    6. Peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas layanan publik. Prioritas pembangunan daerah di atas dirumuskan dari janji-janji kampanye Kepala Dareah dan Wakil Kepala Daerah untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan isu strategis, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan proyek prioritas daerah, serta dukungannya terhadap upaya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)

Tabel 3.1

Keterkaitan Sasaran RPJMN, RPJMD Jawa Barat,

RPJMD Kabupaten Sukabumi dan Renstra Sekretariat Daerah

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran**  **RPJMN** | | **Sasaran**  **RPJMD Jawa Barat** | | **Sasaran**  **RPJMD Kabupaten Sukabumi** | |
| S3 | Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera | S12 | Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk pemerataan pembangunan | S17 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel |
| S4 | Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan | S20 | Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel | S17 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel |
| S20 | Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi | S20 | Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel | S17 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel |
| S24 | Menguatnya stabilitas polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik | S20 | Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel | S17 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel |

1. **Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026 yang diturunkan dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sukabumi. Visi Kabupaten Sukabumi untuk perencanaan jagka menengah tahun 2021- 2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”. Pernyataan visi tersebut memiliki dua elemen penting yaitu Kabupaten Sukabumi yang religius, maju dan inovatif; serta masyarakat sejahtera lahir batin. Kabupaten Sukabumi yang religius, maju dan inovatif, merupakan perwujudan pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadikan aktivitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi utama dalam menjalankan pembangunan untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih baik secara sosial dan ekonomi, serta ditandai dengan perubahan kehidupan masyarakat yang memiliki peradaban yang lebih tinggi. Kondisi ini dimulai dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga dapat memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, terutama aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, serta posisi geostrategis Kabupaten Sukabumi yang menjadi pusat pengembangan wilayah selatan Jawa Barat serta Pulau Jawa

Pernyataan visi Kabupaten Sukabumi di atas memiliki makna sebagai berikut :

***Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif :***

Merupakan perwujudan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadikan aktivitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi utama dalam menjalankan pembangunan untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih baik secara sosial dan ekonomi, serta ditandai dengan perubahan kehidupan masyarakat yang memiliki peradaban yang lebih tinggi. Kondisi ini dimulai dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga dapat memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, terutama aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, serta posisi geostrategis Kabupaten Sukabumi yang menjadi pusat pengembangan wilayah selatan Jawa Barat serta Pulau Jawa

***Masyarakat Sejahtera Lahir Batin :***

Merupakan keadaan masyarakat yang makmur secara ekonomi, sehat jiwa dan raga, serta hidup di lingkungan yang nyaman, aman dan damai. Kondisi ini dapat terwujud ketika masyarakat Kabupaten Sukabumi telah terpenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani.

**Misi :**

1. ***Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing*.**

Sejatinya, manusia memegang peran dan menjadi motor penggerak semua komponen yang ada di dunia, sehingga manusia adalah ujung tombak dalam pengelolaan sumberdaya alam secara keseluruhan. Untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, maka perlu dilakukan perubahan ke arah yang positif dengan membangun sumberdaya manusia yang handal dalam hal ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa/Allah SWT, norma sosial dan budaya lokal serta mampu mencari strategi yang tepat guna memenangkan persaingan. Sumber daya manusia berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sumberdaya lainnya demi pencapaian visi yang maksimal.

1. ***Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan*.**

SDM yang handal dan berdaya saing diharapkan mampu mendongkrak produktivitas dan daya saing ekonomi dengan mengoptimalkan pengelolaan seluruh potensi unggulan daerah khususnya di bidang pertanian dan pariwisata, namun tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang secara langsung akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang saat ini paling optimal memberikan dampak turunan positif di berbagai aspek yang ujungnya pada pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian dengan penekanan pada agrobisnis dan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Pertumbuhan ini akan membuka kesempatan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat.

1. ***Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah*.**

Pembangunan sumberdaya manusia, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah akan dapat diakselerasi jika akses penghubung antar wilayah terbangun dengan baik. Kondisi wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas dengan topografi yang sangat beragam menjadi tantangan dalam peningkatan konektivitas. Konektivitas wilayah ini tidak hanya terkait infrastruktur jalan, namun juga teknologi. Pembangunan infrastruktur baik *hardware* (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara) maupun *software* (teknologi informasi dan komunikasi) akan membuka konektivitas antar wilayah di daerah. Konektivitas yang mudah dapat menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing usaha dan dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi baru. Kerjasama antar wilayah juga akan menjadi mudah sehingga pemerataan pembangunan dapat ditingkatkan.

1. ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel*.**

Pelayanan publik yang cenderung berbelit-belit dan lambat masih merupakan persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi yang maju, inovatif, sejahtera lahir batin perlu adanya reformasi birokrasi di tataran pemerintahan. Profesionalisme birokrasi merupakan prasyaratan mutlak untuk mewujudkan *good governance*, sedangkan akuntabilitas dan transparansi merupakan prasyarat untuk mewujudkan *clean government*. Profesionalisme dan akuntabilitas ini lebih ditekankan pada kemampuan, dan keterampilan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, efektif dan efesien. Dalam rangka mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik maka diperlukan aparatur pelayan publik yang kreatif, inovatif bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Inovasi pelayanan publik akan ditingkatkan dengan memanfaatkan perkembangan dunia dengan mendigitalisasi pelayanan di semua sektor (*egovernment*).

Perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sukabumi didasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan yang hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Arah nilai pembangunan pada ***sektor ekonomi*** Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2025 meliputi : ***Religius – Sejahtera – Mandiri – Inovatif*.**

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi periode 2021-2025 tersebut diatas, maka Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah (PD) memiliki fungsi strategis karena mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dalam menyusun kebijakan dan koordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Adapun fungsi Sekretariat Daerah dalam kaitannya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah meliputi pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial, perekonomian dan pembangunan serta administrasi sebagai bahan penetapan Bupati;
2. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum lingkup Sekretariat Daerah;
3. penyelenggaraan kepemimpinan manajemen pada Sekretariat Daerah;
4. penyelenggaraan koordinasi dan pelayanan administratif, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Kabupaten oleh Perangkat Daerah; dan
5. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Bupati.

Sementara itu kontribusi langsung dalam mewujudkan tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut, Sekretariat Daerah terkait langsung dengan pelaksanaan Misi ke 4 (empat) yaitu ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel***

Adapun tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi mencakup sebagai berikut :

* + - 1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan;
      2. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai nilai keagamaan
      3. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Sekretariat Daerah mulai dari unsur pimpinan, maupun unsur pelaksana (staf) dapat mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai.

Sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi diuraikan sebagai berikut:

* + - 1. Meningkatnya Perekonomian Daerah
      2. Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan
      3. Meningkatnya kualitas pelaporan perencanaan dan keuangan, pelayanan kepegawaian, sarana prasarana internal dan keprotokolan Kepala Daerah
      4. Terwujudnya struktur organisasi pemerintah dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien
      5. Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik
      6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
      7. Terwujudnya pemerintahan yang bersih bebas korupsi kolusi dan nepotisme
      8. Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
      9. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
      10. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan kerja sama pemerintah daerah
      11. Meningkatnya efektivitas pengelolaan administrasi kewilayahan
      12. Terwujudnya pemekaran Kabupaten Sukabumi

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATHIN** | | | | | | | |
| **MISI IV : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel** | | | | | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | | **Strategi** | | **Arah Kebijakan** | |
| Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani | SS.1 | Meningkatnya efektivitas tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rakyat | 1.1 | Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Daerah | 1.1.1 | Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah |
| 1.1.2 | Meningkatkan Pengelolaan administrasi kewilayahan |
| 1.1.3 | Meningkatkan Kualitas Penataan Administrasi Pemerintahan Daerah |
| 1.2 | Peningkatan kebijakan pelayanan sosial dan kemasyarakatan dan Peran lembaga keagamaan | 1.2.1 | Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan |
| 1.2.2 | Meningkatkan kualitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual |
| 1.3 | Peningkatan kualitas produk hukum daerah | 1.3.1 | Meningkatkan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah yang dibentuk, didokumentasikan dan disebarluaskan |
| 1.3.2 | Meningkatkan Fasilitasi Bantuan Hukum |
| 1.4 | Peningkatan kualitas kerjasama Pemerintah Daerah | 1.4.1 | Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi penyusunan MOU kerjasama |
| SS.2 | Meningkatnya efektivitas tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan | 2.1 | Peningkatan implementasi kebijakan perekonomian | 2.1.1 | Meningkatkan Pengelolaan dan Evaluasi BUMD dan BLUD |
| 2.1.2 | Meningkatkan koordinasi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Daerah |
| 2.1.3 | Meningkatkan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil |
| 2.2 | Peningkatan kualitas Pelaksanaan Administrasi pembangunan | 2.2.1 | Meningkatkan Fasilitasi Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Pelaksanaan Pembangunan |
| 2.3 | Peningkatkan Kualitas pengelolaan dan Layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah | 2.3.1 | Peningkatan Level / nilai maturitas Pengadaan Barang dan Jasa |
| 2.3.2 | Pembinaan dan peningkatan SDM Jabatan Fungsional UKPBJ |
| 2.3.3 | Peningkatan paket PBJ yang di proses melalui LPSE |
| 2.4 | Perlindungan, Pengembangan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pembinaan Sumber Daya Alam | 2.4.1 | Meningkatkan koordinasi Pembinaan, Evaluasi dan Pengendalian Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Tujuan** | **Sasaran** | | **Strategi** | | **Arah Kebijakan** | |
| Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani | SS.3 | Meningkatnya efektivitas tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan daerah Bidang Administrasi Umum | 3.1 | Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | 3.1.1 | Meningkatkan Layanan Keprotokolan, Komunikasi dan Pendokumentasian tugas Pimpinan Daerah |
| 3.2 | Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan kinerja dan anggaran | 3.2.1 | Meningkatkan kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran |
| 3.2.2 | Meningkatkan kualitas Penatausahaan Keuangan |
| 3.2.3 | Meningkatkan kualitas Pelaporan Kinerja dan Keuangan |
| 3.3 | Peningkatan kualitas layanan umum dan Pengelolaan BMD | 3.3.1 | Meningkatkan Kinerja Layanan Umum Sekretariat Daerah |
| 3.3.2 | Meningkatkan kualitas Penatausahaan BMD |
| 3.4 | Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik pemerintah daera | 3.4.1 | Meningkatkan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah |
| 3.4.2 | Meningkatkan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan |
| 3.4.3 | Meningkatkan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana |

Tabel 3.3

Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi

Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan RPJMD** | **Sasaran Renstra** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Ket** |
|
| **Misi (4) : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Inovatif, Profesional, dan Akuntabel** | | | | | |
|  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Profesional, dan Akuntabel | Meningkatnya kebijakan strategis, koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Skoring LPPD Kabupaten | 3,67 | Bagian Tata Pemerintahan |
| Persentase kebijakan dibidang Perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana | 100% | Bagian Hukum |
| Prosentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti | 75% | Bagian Kerjasama |
| Persentase kebijakan dibidang bina mental dan spritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana | 100% | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
|  | Meningkatnya kebijakan strategis, koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan Daerah | Persentase pelaksanaa perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan evaluasi perekonomian daerah | 100% | Bagian Perekonomian |
| Persentase Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi | 96% | Bagian Administrasi Pembangunan |
| Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) | Strategis | Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
| Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi sumber daya alam berwawasan lingkungan | 18% | Bagian Sumber Daya Alam |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Ket** |
|
| **Misi (4) : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Inovatif, Profesional, dan Akuntabel** | | | | | |
|  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Profesional, dan Akuntabel | Meningkatnya kebijakan strategis, Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaranaan Pemerintahan Umum | Nilai komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah | 12,5 | Bagian Organisasi |
| Persentase kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi yang terlaksana | 100% | Bagian Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan |
| Persentase penyelesaian dokumen Perencanaan, keuangan dan Pelaporan tepat waktu | 100% | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Daerah | 89 | Bagian Umum |

* 1. **Program dan Kegiatan**

Dinamika regulasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan dan harus disesuaikan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah membawa perubahan mendasar terhadap pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah khususnya perencanaan anggaran.

**Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020** tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah merupakan tindak lanjut dari Pasal 6 dan Lampiran huruf A angka 4 [Permendagri Nomor 90 Tahun 2019](https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2020/06/permendagri-90-2019.html) tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. Dalam Kepmendagri ini menetapkan hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 adalah mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan kepada pendekatan kinerja yang berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja dari RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yakni mewujudkan **KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATHIN**

Mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan *Sustainable Development Goal’s* (SDG’s). dimana Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi dalam merumuskan Rencana Kerja Tahun 2022 berpedoman pada indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s) yang terintegrasi ke dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi.

Pencapaian NSPK dan SPM, Program dan kegiatan diintegrasikan dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk itu NSPK merupakan pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh oleh seluruh masyarakat sanggau secara minimal. Terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar yang notabene pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi dalam merumuskan perencanaan pembangunan agar memperhatikan potensi ekonomi di daerah sebagai salah satu indikatornya. Salah satu indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai pada tahun 2022 dalam rangka mendukung pendayagunaan potensi ekonomi daerah yaitu tersedianya dokumen kajian penyusunan profil investasi daerah Kabupaten Sukabumi

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2023 dengan berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah akan melaksanakan 3 program, 20 kegiatan, dan 95 sub kegiatan. Program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator program tersebut adalah sebagai berikut :

* + 1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Indikator program ini adalah Skoring LPPD Kabupaten dengan target 3,67, Persentase kebijakan dibidang bina mental dan spritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana dengan target 100%, Persentase kebijakan dibidang Perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana dengan target 100% dan Prosentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti dengan target 75%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, diantaranya :

Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, yang terdiri dari sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan, sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, dan sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat, sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat, dan sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, yang terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum, dan Pendokumentasian Produk Hukum dan sub kegiatan Pengelolaan Informasi Hukum

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah, yang terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri, sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri, dan sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

* + 1. Program Perekonomian dan Pembangunan. Indikator program ini adalah Persentase perumusan kebjakan, pengkoordinasian dan evaluasi perekonomian daerah dengan target 100%, Persentase Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan target 96%, Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan target Strategis, Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi sumber daya alam berwawasan lingkungan dengan target 18%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, diantaranya :
    2. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang terdiri dari sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil, Koordinasi, sub kegiatan Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD, dan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
    3. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, dan sub kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
    4. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri dari sub kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, sub kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, dan sub kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
    5. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang terdiri dari sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup, dan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
    6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Indikator program ini adalah Persentase penyelesaian dokumen Perencanaan, keuangan dan Pelaporan tepat waktu dengan target 100%, Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Daerah dengan target 89% , Nilai komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan target 12,50 Persentase kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi yang terlaksana dengan target 100%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, diantaranya :
    7. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan sub kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    8. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dan sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
    9. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, sub kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dan sub kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
    10. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
    11. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor, sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material, sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dan sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
    12. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, sub kegiatan Pengadaan Mebel, sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, sub kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya, sub kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud, sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dan sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    13. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
    14. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, sub kegiatan Pemeliharaan Mebel, sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dan sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    15. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    16. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, dan sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
    17. Kegiatan Penataan Organisasi yang terdiri dari sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
    18. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, sub kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dan sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 terdapat 3 (tiga) program dan 20 (dua puluh) kegiatan dan 101 (seratus satu) sub kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Berikut program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022. Program dan Kegiatan dalam mendukung pemenuhan visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah daerah

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

* + - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp 76,950,000,000, terdiri dari :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **530,000,000** |
|  | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 125,000,000 |
|  | 1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 15,000,000 |
|  | 1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 15,000,000 |
|  | 1. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 25,000,000 |
|  | 1. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 25,000,000 |
|  | 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 175,000,000 |
|  | 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 150,000,000 |
| 2 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **36,225,000,000** |
|  | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 36,000,000,000 |
|  | 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100,000,000 |
|  | 1. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 25,000,000 |
|  | 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 25,000,000 |
|  | 1. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 25,000,000 |
|  | 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 25,000,000 |
|  | 1. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 25,000,000 |
| 3 | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **1,620,216,200** |
|  | 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 55,255,000 |
|  | 1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1,249,987,200 |
|  | 1. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 75,000,000 |
|  | 1. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 50,000,000 |
|  | 1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 25,000,000 |
|  | 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 150,000,000 |
|  | 1. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 14,974,000 |
| 4 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **1,830,000,000** |
|  | 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 350,000,000 |
|  | 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 400,000,000 |
|  | 1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 100,000,000 |
|  | 1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 100,000,000 |
|  | 1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 100,000,000 |
|  | 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 450,000,000 |
|  | 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 160,000,000 |
|  | 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 170,000,000 |
| 5 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **9,000,654,900** |
|  | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 199,999,400 |
|  | 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 520,007,500 |
|  | 1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 299,999,000 |
|  | 1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 3,522,500,000 |
|  | 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 757,158,000 |
|  | 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 76,000,000 |
|  | 1. Penyediaan Bahan/Material | 250,000,000 |
|  | 1. Fasilitasi Kunjungan Tamu | 700,000,000 |
|  | 1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2,499,991,000 |
|  | 1. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 150,000,000 |
|  | 1. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 25,000,000 |
| 6 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **7,917,870,100** |
|  | 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 3,971,776,600 |
|  | 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2,019,444,560 |
|  | 1. Pengadaan Mebel | 349,800,000 |
|  | 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 649,310,000 |
|  | 1. Pengadaan Aset Tetap Lainnya | 25,000,000 |
|  | 1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 300,000,000 |
|  | 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 294,533,200 |
|  | 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 308,005,740 |
| 7 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **6,091,452,800** |
|  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 99,990,000 |
|  | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1,600,000,000 |
|  | 1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 406,600,000 |
|  | 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3,984,862,800 |
| 8 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **8,022,406,000** |
|  | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2,299,760,000 |
|  | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2,749,120,000 |
|  | 1. Pemeliharaan Mebel | 98,550,000 |
|  | 1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 299,994,000 |
|  | 1. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 200,000,000 |
|  | 1. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | 50,000,000 |
|  | 1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1,699,984,000 |
|  | 1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 525,000,000 |
|  | 1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 99,998,000 |
| 9 | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **2,182,400,000** |
|  | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 250,000,000 |
|  | 1. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 132,400,000 |
|  | 1. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 300,000,000 |
|  | 1. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1,500,000,000 |
| 10 | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **780,000,000** |
|  | 1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 318,000,000 |
|  | 1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 306,000,000 |
|  | 1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 156,000,000 |
| 11 | **Penataan Organisasi** | **1,500,000,000** |
|  | 1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 500,000,000 |
|  | 1. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 450,000,000 |
|  | 1. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 200,000,000 |
|  | 1. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 150,000,000 |
|  | 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 200,000,000 |
| 12 | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **1,250,000,000** |
|  | 1. Fasilitasi Keprotokolan | 480,000,000 |
|  | 1. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 320,000,000 |
|  | 1. Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 450,000,000 |

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan anggaran sebesar Rp. 61.000.000.000,00, terdiri dari :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Administrasi Tata Pemerintahan** | **1,650,000,000** |
|  | 1. Penataan Administrasi Pemerintahan | 500,000,000 |
|  | 1. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 350,000,000 |
|  | 1. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 800,000,000 |
| 2 | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **56,600,000,000** |
|  | 1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 55,500,000,000 |
|  | 1. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | 350,000,000 |
|  | 1. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | 350,000,000 |
|  | 1. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 200,000,000 |
|  | 1. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 200,000,000 |
| 3 | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | **1,600,000,000** |
|  | 1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 400,000,000 |
|  | 1. Fasilitasi Bantuan Hukum | 850,000,000 |
|  | 1. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 350,000,000 |
| 4 | **Fasilitasi Kerja Sama Daerah** | **1,150,000,000** |
|  | 1. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 550,000,000 |
|  | 1. Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | 300,000,000 |
|  | 1. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 300,000,000 |

Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp 5.050.000.000, terdiri dari:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | **1,450,000,000** |
|  | 1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 400,000,000 |
|  | 1. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 450,000,000 |
|  | 1. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 300,000,000 |
|  | 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | 50,000,000 |
|  | 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | 250,000,000 |
| 2 | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | **750,000,000** |
|  | 1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | 250,000,000 |
|  | 1. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 250,000,000 |
|  | 1. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 250,000,000 |
| 3 | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | **1,800,000,000** |
|  | 1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 550,000,000 |
|  | 1. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 650,000,000 |
|  | 1. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 600,000,000 |
| 4 | **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** | **1,050,000,000** |
|  | 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 450,000,000 |
|  | 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 300,000,000 |
|  | 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 300,000,000 |

Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C.33. Seluruh program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 yang tertuang dalam Rencana Kerja ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | Keterangan |
| Capaian Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Prioritas Pembangunan Nasional |
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target |
| **4** |  |  |  |  | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** |  |  |  | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | |  |  |  |
| **4** | **01** | **001** |  |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | | | | Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Administrasi Umum yang terlaksana | 100 % |  |  |  |  | **76,950,000,000** | **83,580,000,000** |  |
| **4** | **01** | **001** | 02.01 |  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | |  |  |  |  | Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 dokumen | **530,000,000** | **605,000,000** |  |
| 4 | 01 | 001 | 02.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen |  |  | 125,000,000 | 150,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen |  |  | 15,000,000 | 15,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen |  |  | 15,000,000 | 15,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | Keterangan |
| Capaian Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Prioritas Pembangunan Nasional |
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target |
| 4 | 01 | 001 | 02.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen |  |  | 25,000,000 | 25,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen |  |  | 25,000,000 | 25,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Dokumen |  |  | 175,000,000 | 225,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.01 | 007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan |  |  | 150,000,000 | 150,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| **4** | **01** | **001** | 02.02 |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | |  |  |  |  | Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah | 8 Dokumen | **36,225,000,000** | **40,275,000,000** |  |
| 4 | 01 | 001 | 02.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Dokumen |  |  | 36,000,000,000 | 40,000,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.02 | 003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen |  |  | 100,000,000 | 100,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | Keterangan |
| Capaian Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Prioritas Pembangunan Nasional |
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target |
| 4 | 01 | 001 | 02.02 | 004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen |  |  | 25,000,000 | 25,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.02 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan |  |  | 25,000,000 | 25,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen |  |  | 25,000,000 | 50,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.02 | 007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD | 18 Laporan |  |  | 25,000,000 | 50,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.02 | 008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen |  |  | 25,000,000 | 25,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| **4** | **01** | **001** | 02.03 |  | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | |  |  |  |  | Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1 Dokumen | **1,620,216,200** | **1,825,000,000** |  |
| 4 | 01 | 001 | 02.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen |  |  | 55,255,000 | 75,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | Keterangan |
| Capaian Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Prioritas Pembangunan Nasional |
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target |
| 4 | 01 | 001 | 02.03 | 002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen |  |  | 1,249,987,200 | 1,400,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.03 | 003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan |  |  | 75,000,000 | 100,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.03 | 004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan |  |  | 50,000,000 | 75,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.03 | 005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan |  |  | 25,000,000 | 50,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.03 | 006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan |  |  | 150,000,000 | 50,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.03 | 007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen |  |  | 14,974,000 | 75,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| **4** | **01** | **001** | 02.05 |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | |  |  |  |  | Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 Dokumen | **1,830,000,000** | **1,950,000,000** |  |
| 4 | 01 | 001 | 02.05 | 001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit |  |  | 350,000,000 | 350,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | Keterangan |
| Capaian Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Prioritas Pembangunan Nasional |
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target |
| 4 | 01 | 001 | 02.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket |  |  | 400,000,000 | 500,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.05 | 003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen |  |  | 100,000,000 | 100,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.05 | 004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 Dokumen |  |  | 100,000,000 | 100,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.05 | 005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen |  |  | 100,000,000 | 0 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.05 | 009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 50 Orang |  |  | 450,000,000 | 500,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.05 | 010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 180 Orang |  |  | 160,000,000 | 200,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.05 | 011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 100 Orang |  |  | 170,000,000 | 200,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | Keterangan |
| Capaian Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Prioritas Pembangunan Nasional |
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target |
| **4** | **01** | **001** | 02.06 |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | |  |  |  |  | Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Dokumen | **9,000,654,900** | **9,200,000,000** |  |
| 4 | 01 | 001 | 02.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket |  |  | 199,999,400 | 350,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket |  |  | 520,007,500 | 750,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.06 | 003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket |  |  | 299,999,000 | 300,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket |  |  | 3,522,500,000 | 3,250,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket |  |  | 757,158,000 | 800,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen |  |  | 76,000,000 | 150,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.06 | 007 | Penyediaan Bahan/Material | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 3 Paket |  |  | 250,000,000 | 250,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | Keterangan |
| Capaian Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Prioritas Pembangunan Nasional |
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target |
| 4 | 01 | 001 | 02.06 | 008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan |  |  | 700,000,000 | 500,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan |  |  | 2,499,991,000 | 2,500,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.06 | 010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen |  |  | 150,000,000 | 200,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.06 | 011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen |  |  | 25,000,000 | 150,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| **4** | **01** | **001** | 02.07 |  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | |  |  |  |  | Jumlah barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan | 9 Dokumen | **7,917,870,100** | **6,850,000,000** |  |
| 4 | 01 | 001 | 02.07 | 001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 12 Unit |  |  | 3,971,776,600 | 2,500,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.07 | 002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 6 Unit |  |  | 2,019,444,560 | 1,750,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | Keterangan |
| Capaian Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Prioritas Pembangunan Nasional |
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target |
| 4 | 01 | 001 | 02.07 | 005 | Pengadaan Mebel | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 6 Unit |  |  | 349,800,000 | 350,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.07 | 006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 8 Unit |  |  | 649,310,000 | 700,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.07 | 007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 5 Unit |  |  | 25,000,000 | 150,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.07 | 009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit |  |  | 300,000,000 | 500,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit |  |  | 294,533,200 | 500,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.07 | 011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit |  |  | 308,005,740 | 300,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| **4** | **01** | **001** | 02.08 |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | |  |  |  |  | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | 4 Dokumen | **6,091,452,800** | **6,150,000,000** |  |
| 4 | 01 | 001 | 02.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan |  |  | 99,990,000 | 150,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | Keterangan |
| Capaian Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Prioritas Pembangunan Nasional |
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target |
| 4 | 01 | 001 | 02.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan |  |  | 1,600,000,000 | 1,750,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan |  |  | 406,600,000 | 250,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan |  |  | 3,984,862,800 | 4,000,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| **4** | **01** | **001** | 02.09 |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | |  |  |  |  | Jumlah barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara | 9 Dokumen | **8,022,406,000** | **9,900,000,000** |  |
| 4 | 01 | 001 | 02.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 55 Unit |  |  | 2,299,760,000 | 2,500,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 50 Unit |  |  | 2,749,120,000 | 3,000,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | Keterangan |
| Capaian Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Prioritas Pembangunan Nasional |
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target |
| 4 | 01 | 001 | 02.09 | 005 | Pemeliharaan Mebel | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 8 Unit |  |  | 98,550,000 | 200,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit |  |  | 299,994,000 | 250,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.09 | 007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 6 Unit |  |  | 200,000,000 | 200,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.09 | 008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 2 Unit |  |  | 50,000,000 | 100,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 6 Unit |  |  | 1,699,984,000 | 2,000,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit |  |  | 525,000,000 | 800,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.09 | 011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit |  |  | 99,998,000 | 850,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | Keterangan |
| Capaian Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Prioritas Pembangunan Nasional |
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target |
| **4** | **01** | **001** | 02.11 |  | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | | | |  |  |  |  | Jumlah dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 4 Dokumen | **2,182,400,000** | **2,850,000,000** |  |
| 4 | 01 | 001 | 02.11 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 orang |  |  | 250,000,000 | 300,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.11 | 002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 6 Paket |  |  | 132,400,000 | 200,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.11 | 003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 8 Orang |  |  | 300,000,000 | 350,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.11 | 004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 orang |  |  | 1,500,000,000 | 2,000,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| **4** | **01** | **001** | 02.12 |  | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah paket Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 3 Paket | **780,000,000** | **975,000,000** |  |
| 4 | 01 | 001 | 02.12 | 001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 2 Paket |  |  | 318,000,000 | 400,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | Keterangan |
| Capaian Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Prioritas Pembangunan Nasional |
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target |
| 4 | 01 | 001 | 02.12 | 002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 2 Paket |  |  | 306,000,000 | 350,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.12 | 003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 1 Paket |  |  | 156,000,000 | 225,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| **4** | **01** | **001** | 02.13 |  | **Penataan Organisasi** | | | |  |  | Jumlah dokumen penataan organisasi | 3 Dokumen |  |  | **1,500,000,000** | **1,500,000,000** |  |
| 4 | 01 | 001 | 02.13 | 001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 1 Dokumen |  |  | 500,000,000 | 500,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.13 | 002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 3 Laporan |  |  | 450,000,000 | 450,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.13 | 003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 2 Dokumen |  |  | 200,000,000 | 200,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.13 | 004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 1 Dokumen |  |  | 150,000,000 | 150,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.13 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 3 Dokumen |  |  | 200,000,000 | 200,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | Keterangan |
| Capaian Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Prioritas Pembangunan Nasional |
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target |
| **4** | **01** | **001** | 02.14 |  | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | | | |  |  |  |  | Jumlah laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 3 Laporan | **1,250,000,000** | **1,500,000,000** |  |
| 4 | 01 | 001 | 02.14 | 001 | Fasilitasi Keprotokolan | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 12 Laporan |  |  | 480,000,000 | 550,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.14 | 002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 12 Laporan |  |  | 320,000,000 | 450,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 001 | 02.14 | 003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 12 Laporan |  |  | 450,000,000 | 500,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| **4** | **01** | **002** |  |  | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | Persentase Realisasi Kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **01** | **002** | 02.01 |  | **Administrasi Tata Pemerintahan** |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah dokumen Administrasi Tata Pemerintahan | 3 Dokumen | **1,650,000,000** | **1,900,000,000** |  |
| 4 | 01 | 002 | 02.01 | 001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 2 dokumen |  |  | 500,000,000 | 600,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 002 | 02.01 | 002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 4 Dokumen |  |  | 350,000,000 | 450,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | Keterangan |
| Capaian Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Prioritas Pembangunan Nasional |
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target |
| 4 | 01 | 002 | 02.01 | 003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 5 Dokumen |  |  | 800,000,000 | 850,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| **4** | **01** | **002** | 02.02 |  | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 3 Dokumen | **56,600,000,000** | **51,600,000,000** |  |
| 4 | 01 | 002 | 02.02 | 001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 3 dokumen |  |  | 55,500,000,000 | 50,500,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 002 | 02.02 | 002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 3 Dokumen |  |  | 350,000,000 | 350,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 002 | 02.02 | 003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 3 Dokumen |  |  | 350,000,000 | 350,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | Keterangan |
| Capaian Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Prioritas Pembangunan Nasional |
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target |
| 4 | 01 | 002 | 02.02 | 004 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 75 Keluarga |  |  | 200,000,000 | 200,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 002 | 02.02 | 005 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 100 Keluarga |  |  | 200,000,000 | 200,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| **4** | **01** | **002** | 02.03 |  | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 3 Dokumen | **1,600,000,000** | **1,700,000,000** |  |
| 4 | 01 | 002 | 02.03 | 001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 100 Dokumen |  |  | 400,000,000 | 450,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 002 | 02.03 | 002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 12 Kasus |  |  | 850,000,000 | 850,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 002 | 02.03 | 003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 3 Dokumen |  |  | 350,000,000 | 400,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | Keterangan |
| Capaian Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Prioritas Pembangunan Nasional |
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target |
| **4** | **01** | **002** | 02.04 |  | **Fasilitasi Kerja Sama Daerah** |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah dokumen Fasilitasi Kerja Sama Daerah | 3 Dokumen | **1,150,000,000** | **1,150,000,000** |  |
| 4 | 01 | 002 | 02.04 | 001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 12 Dokumen |  |  | 550,000,000 | 550,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 002 | 02.04 | 002 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | 2 Dokumen |  |  | 300,000,000 | 300,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 002 | 02.04 | 003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 5 Laporan |  |  | 300,000,000 | 300,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| **4** | **01** | **003** |  |  | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** |  |  |  | Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Perkonomian dan Pembangunan yang terlaksana | 100 % |  |  |  |  | **5,050,000,000** | **5,475,000,000** |  |
| **4** | **01** | **003** | 02.01 |  | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 3 Dokumen | **1,450,000,000** | **1,525,000,000** |  |
| 4 | 01 | 003 | 02.01 | 001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 4 Dokumen |  |  | 400,000,000 | 400,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | Keterangan |
| Capaian Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Prioritas Pembangunan Nasional |
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target |
| 4 | 01 | 003 | 02.01 | 002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 2 Laporan |  |  | 450,000,000 | 450,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 003 | 02.01 | 003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 1 Dokumen |  |  | 300,000,000 | 300,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 003 | 02.01 | 004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | 1 Dokumen |  |  | 50,000,000 | 75,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 003 | 02.01 | 005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | 1 Dokumen |  |  | 250,000,000 | 300,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| **4** | **01** | **003** | 02.02 |  | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 3 Dokumen | **750,000,000** | **900,000,000** |  |
| 4 | 01 | 003 | 02.02 | 001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 5 Dokumen |  |  | 250,000,000 | 300,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 003 | 02.02 | 002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 6 Laporan |  |  | 250,000,000 | 300,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 003 | 02.02 | 003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 5 Laporan |  |  | 250,000,000 | 300,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | Keterangan |
| Capaian Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Prioritas Pembangunan Nasional |
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target |
| **4** | **01** | **003** | 02.03 |  | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 3 Dokumen | **1,800,000,000** | **1,900,000,000** |  |
| 4 | 01 | 003 | 02.03 | 001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 12 dokumen |  |  | 550,000,000 | 600,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 003 | 02.03 | 002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 2 Dokumen |  |  | 650,000,000 | 650,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 003 | 02.03 | 003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 75 Orang |  |  | 600,000,000 | 650,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| **4** | **01** | **003** | 02.04 |  | **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam | 3 Dokumen | **1,050,000,000** | **1,150,000,000** |  |
| 4 | 01 | 003 | 02.04 | 001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 2 Dokumen |  |  | 450,000,000 | 450,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | Keterangan |
| Capaian Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Prioritas Pembangunan Nasional |
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target |
| 4 | 01 | 003 | 02.04 | 002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 2 Dokumen |  |  | 300,000,000 | 350,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| 4 | 01 | 003 | 02.04 | 003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan publik |  | Kab. Sukabumi |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 3 Dokumen |  |  | 300,000,000 | 350,000,000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |

**BAB V**

**PENUTUP**

* 1. **Catatan Penting**

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memenuhi kewajiban sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah tahun 2021-2026. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023.

* 1. **Kaidah Pelaksanaan**

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan

* 1. **Rencana Tindak Lanjut**

Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi mempunyai Tugas Pokok menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Untuk keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi ini sangat tergantung kepada komitmen bersama antar unit organisasi dan para penentu kebijakan, oleh karena itu diharapkan agar semua penyelenggaran pemerintahan konsisten terhadap kedudukan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan dan mempedomani terhadap rencana programnya masing-masing

Dalam pelaksanaannya nantinya Rencana Kerja yang telah dtetapkan harus dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan dan mekanisme yang berlaku.

Palabuhanratu, Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH,**

****

**ADE SURYAMAN, SH, MM**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196708151996031002